

MEMBABAT HUTAN TANPA HENTI

Hubungan dengan PT Adindo
Hutani Lestari mencederai
komitmen nol-deforestasi
APRIL Grup



Koalisi Anti Mafia Hutan



Referensi

Koalisi Anti Mafia Hutan *et al.* 2020. *Membabat Hutan Tanpa Henti: Hubungan dengan PT Adindo Hutani Lestari mencederai komitmen nol-deforestasi APRIL Grup*. 6 Oktober 2020. Jakarta, Indonesia.

Laporan ini juga diterbitkan dalam Bahasa Inggris, sebagai berikut:

Koalisi Anti Mafia Hutan *et al.* 2020. *Sustaining Deforestation: APRIL's Links with PT Adindo Hutani Lestari Undercut "No Deforestation" Pledge*. October 6, 2020. Jakarta, Indonesia.

Disclaimer

Laporan ini disusun berdasarkan informasi publik yang tersedia, yang diperoleh dari berbagai sumber sebagaimana disebutkan. Verifikasi independen terhadap sumber informasi tidak dilakukan, dan terhadap pendapat para penulis, sepenuhnya merupakan pendapat para penulis dan tidak dimaksud sebagai nasihat untuk pihak atau kepentingan tertentu.



Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

Foto depan: Auriga 2020.

Isi

Daftar Tabel dan Gambar	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
I. Pendahuluan	1
II. Metode dan Data	2
III. Komitmen “Nol Deforestasi” Grup APRIL	4
IV. Peran Adindo sebagai Pemasok untuk APRIL	6
V. Deforestasi di Areal Konsesi Adindo	7
VI. Pembukaan Hutan di Lahan Gambut di Konsesi Adindo	12
VII. Kelindan Korporat antara APRIL dan Adindo	14
VIII. Kegagalan KPMG dalam Mendeteksi Pelanggaran di Konsesi Adindo dalam “Laporan Jaminan”	32
IX. Kesimpulan	34
X. Rekomendasi	36
Lampiran A. Peta yang Terdapat di Ringkasan Eksekutif Penilaian Nilai Konservasi Tinggi untuk PT Adindo Hutani Lestari yang Disusun pada Tahun 2014 oleh Tropenbos International, dan Diumumkan di Situs Web APRIL	38
Lampiran B. “Daftar Sumber Pasokan Serat Kayu APRIL per Tanggal 31 Agustus 2020” yang Diumumkan di Situs Web APRIL	39
Lampiran C. Keterkaitan East Trade Limited sebagaimana Terungkap di Basis Data Offshore Leaks ICIJ	40
Lampiran D. Surat PT Adindo Hutani Lestari kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper Mengenai Temuan Utama di Laporan ini	41
Lampiran E. Tanggapan Grup APRIL terhadap Temuan Utama di Laporan ini	43
Lampiran F. Tanggapan KPMG Performance Registrar Inc. terhadap Temuan Utama di Laporan ini	49

Figures and Tables

Gambar 1: Ekskavator menimbun kayu bulat di lahan gambut di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari pada bulan Januari 2015 sebelum komitmen SFMP 2.0 APRIL mulai berlaku	5
Tabel 1. Pasokan kayu pulp dari PT Adindo Hutani Lestari ke pabrik APRIL di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau	6
Tabel 2. Deforestasi di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari selama periode 3 Juni 2015 sampai 31 Agustus 2020	7
Gambar 2. Deforestasi di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari selama 3 Juni 2015 sampai 31 Agustus 2020, dan hutan yang masih tersisa per 31 Agustus 2020	8
Gambar 3. Rangkaian waktu pengembangan HTI di lahan gambut berhutan 2014–2019	10
Gambar 4. Citra beresolusi tinggi yang memperlihatkan pembukaan hutan di lahan gambut di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari dari tahun 2016 sampai 2017	11
Gambar 5. Lahan gambut dan deforestasi di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari selama 3 Juni 2015 sampai 31 Agustus 2020	12
Gambar 6. Foto-foto pembukaan lahan pada September 2020 di lahan gambut yang telah deforestasi di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari	13
Gambar 7. Peta Pemasok Pasar Terbuka APRIL yang terbit di “laporan jaminan” KPMG pada tahun 2018	15
Gambar 8. Struktur kepemilikan PT Adindo Hutani Lestari	16
Gambar 9. Keterkaitan East Globe Logistics Corporation (BVI) dengan PT Adindo Hutani Lestari	17
Gambar 10. Keterkaitan Pacific Fiber Limited (BVI) dengan PT Adindo Hutani Lestari	18
Gambar 11. Sukanto Tanoto, Pendiri dan Ketua Royal Golden Eagle	19
Gambar 12. Keterkaitan Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei dengan PT Adindo Hutani Lestari	20
Gambar 13. Dewan Pengurus Tanoto Foundation dari Laporan Tahunan Tanoto Foundation 2015	21
Gambar 14. Keterkaitan Protasius Daritan dengan PT Adindo Hutani Lestari	22
Gambar 15. Petikan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada sidang manajer perpajakan PT Asian Agri	23
Gambar 16. Keterkaitan Haryanto Wisastra dengan PT Adindo Hutani Lestari	23
Gambar 17. Petikan dari Laporan Tahunan 2009 PT Toba Pulp Lestari Tbk.	24
Gambar 18. Keterkaitan Dedy Sutanto dengan PT Adindo Hutani Lestari	25
Gambar 19. Keterkaitan Ferdinand Flores dengan PT Adindo Hutani Lestari	26
Gambar 20. Situs web Grup APRIL dengan alamat PT Riau Andalan Pulp & Paper	27

Gambar 21. Gedung di Jl. Teluk Betung No. 31, yang menjadi kantor pusat RGE, Grup APRIL, dan PT Riau Andalan Pulp & Paper di Jakarta	28
Gambar 22. Perusahaan perantara di struktur kepemilikan Adindo yang pernah berkantor di kantor pusat RGE, Grup APRIL, dan PT Riau Andalan Pulp & Paper di Jakarta	28
Gambar 23. Gedung kantor terkait RGE di Jl. Teluk Betung No. 36	29
Gambar 24. Perusahaan induk di struktur kepemilikan Adindo yang pernah berkantor di Jl. Teluk Betung No. 36, alamat yang terkait RGE di Jakarta	29
Gambar 25. Situs web Asian Agri dengan informasi kontak	30
Gambar 26. Gedung Uniplaza di Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi lokasi kantor PT Asian Agri dan PT Toba Pulp Lestari	30
Gambar 27. Perusahaan perantara di struktur kepemilikan Adindo yang pernah berkantor di Gedung Uniplaza di Jl. Letjen Haryono MT No. A-1, Medan, Provinsi Sumatera Utara	30
Gambar 28. Struktur korporat Adindo	31
Gambar 29. Petikan dari laporan KPMG terhadap pelaksanaan kebijakan keberlanjutan APRIL (2018) tentang Pemasok Pasar Terbuka	32
Gambar 30. Petikan dari laporan KPMG terhadap pelaksanaan kebijakan keberlanjutan APRIL (2018) tentang indikator kinerja terkait dengan keberlanjutan jangka panjang	33

Ringkasan Eksekutif

Pada bulan Juni 2015, Grup APRIL, yaitu produsen pulp dan kertas terbesar kedua di Indonesia, dan perusahaan induknya, Grup Royal Golden Eagle (RGE), menerapkan kebijakan “nol deforestasi” di rantai pasokannya. APRIL juga berkomitmen untuk “tidak ada pengembangan baru di lahan gambut yang berhutan oleh APRIL dan para pemasoknya.” Berdasarkan analisis yang menggunakan citra satelit, laporan ini mendokumentasikan deforestasi yang luas, termasuk pembukaan hutan di lahan gambut di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari (Adindo), yaitu salah satu dari lima pemasok kayu pulp terbesar pada APRIL, selama periode 3 Juni 2015 – 31 Agustus 2020. Temuan ini merupakan pelanggaran signifikan terhadap komitmen APRIL dan Grup RGE untuk menghentikan pengembangan baru di lahan gambut berhutan – dan lebih luas lagi, menantang integritas janji APRIL dan RGE akan “nol deforestasi”.

Deforestasi terdeteksi di lahan seluas 7.291 hektar (ha) – setara dengan 10.000 lapangan sepak bola – selama periode di mana Adindo memasok lebih dari 2 juta meter kubik kayu (muatan hampir 80.000 truk) ke pabrik pulp APRIL di pulau Sumatera. Seluruh kayu Adindo yang dipasok ke APRIL dilaporkan sebagai spesies yang berasal dari hutan tanaman. Padahal APRIL sudah menyatakan kebijakan untuk tidak menerima kayu dari pemasok yang “diketahui telah membuka lahan di hutan NKT (Nilai Konservasi Tinggi) atau SKT (Stok Karbon Tinggi), maupun lahan gambut yang berhutan”. Lebih dari separuh luas deforestasi (3.769 ha) terjadi di dalam areal yang ditetapkan memiliki Nilai Konservasi Tinggi dalam penilaian oleh Tropenbos International pada 2014, dan sepertinya tidak ada penilaian SKT yang diumumkan kepada publik. Hampir semua deforestasi yang terjadi di kawasan HCV berada di lokasi yang ditetapkan pada peta Tropenbos sebagai “tanaman pokok dengan water management”. Tampaknya terminologi ini merujuk pada kawasan lahan gambut yang telah ditetapkan memiliki Nilai Konservasi Tinggi dan telah ditetapkan oleh pemegang konsesi untuk pengembangan HTI kayu pulp. Deforestasi terdeteksi pada 3.790 ha lahan gambut yang kaya akan karbon, di mana sebagian besar lahan gambut yang dibuka (2.141 ha) ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 2017 sebagai “fungsi lindung”.

APRIL menyatakan PT Adindo Hutani Lestari sebagai “Pemasok Pasar Terbuka” dan di hadapan publik menggambarkan Adindo sebagai perusahaan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan legal apapun selain hubungan rantai pasokan. Pernyataan ini sangat sulit untuk mencocokkan dengan adanya keterkaitan berlapis-lapis dengan perusahaan dan orang individu yang terkait dengan APRIL dan grup induknya, yaitu RGE. Struktur korporat Adindo yang kompleks – dengan jaringan perusahaan induk lepas pantai, banyak di antaranya yang berdomisili di yurisdiksi berpajak rendah – yang memiliki efek mengaburkan pihak yang paling bertanggung jawab atas perusahaan. Analisis yang disajikan dalam laporan ini mengisyaratkan bahwa Adindo dikendalikan oleh individu tertentu yang merupakan pemilik manfaat dan/atau berafiliasi erat dengan APRIL dan Grup RGE.

APRIL berusaha meyakinkan pemangku kepentingan tentang kepatuhannya pada kebijakan keberlanjutan dengan menugaskan perusahaan audit KPMG untuk menyusun “laporan jaminan”. Namun tidak ada indikasi, baik dalam “laporan jaminan” terbaru KPMG yang diterbitkan pada bulan Juli 2019, maupun laporan sebelumnya, bahwa deforestasi yang luas terjadi di areal NKT dan lahan gambut di dalam konsesi Adindo. Kegagalan “laporan jaminan” KPMG untuk mendeteksi deforestasi dan pengembangan di lahan gambut menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem APRIL untuk memastikan kepatuhannya pada kebijakan keberlanjutannya sendiri.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menimbulkan pertanyaan yang merisaukan tentang cara APRIL dan Grup RGE dalam melaksanakan dan memonitor komitmen “nol deforestasi” dan “tidak ada pengembangan baru di lahan gambut”. Ini berdampak integritas komitmen keberlanjutan APRIL, dan integritas komitmen dari

pembeli pulp APRIL, termasuk perusahaan afliasinya, Sateri, yaitu produsen viscose staple fiber (VSF) yang paling terkemuka. Diyakini bahwa di antara konsumen Sateri – dan secara tidak langsung, konsumen APRIL – terdapat berbagai merek pakaian global ternama, toko pakaian terkenal, dan penjual online yang terbesar di dunia.

Laporan ini tidak menyatakan bahwa perusahaan atau individu yang disebutkan di sini telah melanggar hukum di Republik Indonesia atau yurisdiksi lain.

Koalisi Anti Mafia Hutan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi berikut, kepada:

PT Adindo Hutani Lestari agar:

- Segera menghentikan seluruh deforestasi dan pengembangan di lahan gambut di dalam areal konsesi HTI;
- Mengumumkan rencana yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melindungi 61.334 ha hutan alam yang masih tersisa, dan merestorasi seluruh areal NKT yang terdegradasi, calon hutan SKT dan ekosistem gambut (terlepas dari kedalaman gambut maupun klasifikasi) di dalam areal konsesinya.

Grup APRIL agar:

- Menyelidiki dan menerbitkan laporan publik mengenai deforestasi di areal konsesi Adindo selama periode diberlakukannya kebijakan SFMP 2.0 APRIL pada tanggal 3 Juni 2015, dan menjelaskan mengapa deforestasi tersebut tidak terdeteksi oleh APRIL maupun mitra keberlanjutannya sampai sekarang;
- Menerapkan dengan sepenuhnya seluruh ketentuan “nol-deforestasi” dan “tidak ada pengembangan baru di lahan gambut yang berhutan” yang terdapat dalam Kerangka Kerja Keberlanjutan Industri Kehutanan, Serat, Pulp & Kertas RGE dan SFMP 2.0 APRIL. Untuk hal tersebut diperlukan kepatuhan dengan Pendekatan Stok Karbon Tinggi, penugasan tenaga penilai bersertifikat Assessor Licensing Scheme (ALS), dan keikutsertaan dalam prosesor asuransi mutu HCV Resource Network guna menjamin pengidentifikasian areal NKT, hutan SKT dan lahan gambut secara mantap, serta pengacuan pada buku pedoman Integrated HCV-HCS Approach Assessment Manual;
- Mengumumkan struktur manajemen Adindo dan “Pemasok Pasar Terbuka” lain, dan menjelaskan kepada publik seluruh keterkaitan – baik langsung maupun tidak langsung – dengan APRIL, Grup RGE dan/atau keluarga Tanoto.

KPMG Performance Registrar Inc. agar:

- Melakukan kajian yang akuntabel menyangkut deforestasi dan pengembangan di lahan gambut yang terjadi di areal konsesi HTI yang dioperasikan oleh PT Adindo Hutani Lestari dan PT Fajar Surya Swadaya, dan menilai pelanggaran yang tampak terhadap komitmen SFMP 2.0 APRIL.

Forest Stewardship Council agar:

- Menghentikan proses peta jalan rencana reasosiasi APRIL dengan FSC, setidaknya sampai investigasi independen menyangkut deforestasi yang terdokumentasi di PT Adindo Hutani Lestari dan PT Fajar Surya Swadaya sudah diselesaikan;
- Mewajibkan Grup APRIL supaya memberlakukan transparansi struktur korporat untuk APRIL, perusahaan operasionalnya, para pemasok serat kayunya, serta para pemegang saham dan afliasinya sebagaimana telah diwajibkan oleh FSC kepada Asia Pulp & Paper (APP).

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia agar:

- Mewajibkan PT Adindo Hutani Lestari dan para pemegang saham korporatnya untuk mematuhi Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018, yang mengamankan semua perusahaan yang terdaftar di Indonesia untuk mengumumkan kepemilikan manfaatnya sebelum bulan Maret 2019.

Lokasi konsesi HTI PT Adindo Hutani Lestari dan pabrik pulp APRIL di Riau



I. Pendahuluan

Sebagai salah satu produsen pulp, kertas dan viscose terbesar di dunia, Grup APRIL dan perusahaan induknya, yaitu Grup Royal Golden Eagle (RGE), sudah berkomitmen pada “nol deforestasi” dalam rantai pasokannya dan penghentian pengembangan baru di lahan gambut berhutan dari tanggal 3 Juni 2015. Meskipun berkomitmen tersebut, APRIL tetap membeli bahan baku kayu dalam volume besar dari salah satu perusahaan pemasok utama, yaitu PT Adindo Hutani Lestari, yang telah menebang ribuan hektar hutan alam untuk mengembangkan hutan tanaman kayu pulp di Kalimantan. Temuan dalam laporan ini meningkatkan kekhawatiran akan integritas komitmen keberlanjutan APRIL, dan integritas komitmen dari pembeli pulp APRIL, termasuk perusahaan afiliasinya, Sateri, yaitu produsen *viscose staple fiber* (VSF) yang paling terkemuka. Diyakini bahwa di antara konsumen Sateri – dan secara tidak langsung, konsumen APRIL – terdapat berbagai merek pakaian global ternama, toko pakaian terkenal, dan penjual online yang terbesar di dunia.¹

PT Adindo Hutani Lestari (Adindo) sejak tahun 2003 mengantongi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 181.837 hektare (ha) di Provinsi Kalimantan Utara.^{2,3} Selama lima tahun terakhir, Adindo menjadi salah satu pemasok kayu pulp utama ke pabrik raksasa APRIL di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, di Pulau Sumatera. Kayu dari areal konsesi HTI milik Adindo diangkut dengan kapal laut ke pabrik APRIL yang dioperasikan oleh PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Intiguna Primatama.⁴

Sejak tanggal 3 Juni 2015 – yaitu tanggal komitmen “nol deforestasi” APRIL mulai berlaku⁵ – sampai 31 Agustus 2020 diperkirakan 7.291 hektare hutan alam telah dimusnahkan di dalam areal konsesi Adindo. Sekitar 52% di antaranya terjadi di lokasi yang telah ditetapkan sebagai areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dalam penilaian yang ditugaskan oleh Adindo dan diedarkan oleh Grup APRIL.⁶ Lebih dari 50% deforestasi tersebut juga terdeteksi di lahan gambut yang kaya akan karbon dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, mengacu pada kedalaman dan kondisinya.

Laporan ini tidak menyatakan bahwa deforestasi dan konversi lahan gambut yang didokumentasikan di konsesi PT Adindo Hutani Lestari selama periode 3 Juni 2015 – 31 Agustus 2020 merupakan pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah Indonesia. Juga laporan ini tidak menyatakan bahwa APRIL atau perusahaan operasinya telah membeli atau memanfaatkan kayu yang dipanen dari pembukaan lahan terkait dengan deforestasi dan konversi lahan gambut yang didokumentasikan di konsesi PT Adindo Hutani Lestari selama periode 3 Juni 2015 – 31 Agustus 2020.

Menanggapi tinjauan terhadap temuan awal dari kajian ini, Direktur Keberlanjutan dan Eksternal APRIL menyatakan, “Berdasarkan investigasi internal, kami berkesimpulan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap komitmen SFMP 2.0 kami atau perusakan areal NKT manapun dalam HTI yang dikembangkan di PT AHL (Adindo Hutani Lestari) antara bulan Juni 2015 sampai Juni 2020.” Surat APRIL disajikan secara lengkap sebagai Lampiran E. Tanggapan PT Adindo Hutani Lestari terhadap temuan ini juga disajikan sebagai Lampiran D.

-
- 1 Menurut Changing Markets, per tahun 2019, konsumen Sateri termasuk H&M, Tesco, Marks & Spencer, dan berbagai perusahaan lain. Banyak merek pakaian besar lainnya tidak mengumumkan nama pemasok viscosenya. Untuk mengetahui daftar konsumen Sateri dan merek yang tidak mengumumkan sumber pasokannya, lihat <https://dirtyfashion.info/brands>.
 - 2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Basis Data Geospasial KLHK 2019. Berdasarkan sertifikat PHPL PT Adindo Hutani Lestari yang terbit pada tanggal 10 Juli 2018, maka luas areal konsesi adalah 191,487 ha.
 - 3 Sebelum tahun 2012, lokasi areal konsesi Adindo masih menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. Namun, setelah pemekaran pada tahun 2012, provinsi tersebut dibagi dua menjadi provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
 - 4 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015–2019. “PT Riau Andalan Pulp and Paper.” Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
 - 5 APRIL. 2015. Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFMP) 2.0. Asia Pacific Resources International Holdings Limited. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2020. <https://sustainability.aprilasia.com/en/sustainable-forest-management-policy-sfmp-2-0/>.
 - 6 Sebagian besar kawasan NKT di mana deforestasi terjadi diberi label sebagai “tanaman pokok dengan water management” di peta Tropenbos, yang menunjukkan bahwa kawasan tersebut mengacu pada lahan gambut yang telah ditetapkan untuk pengembangan hutan tanaman kayu pulp.

II. Metode dan Data

Pertama, kajian ini mendokumentasikan luas areal deforestasi yang terjadi di konsesi Adindo selama periode 3 Juni 2015 sampai 31 Agustus 2020. Deforestasi diartikan sebagai hilangnya tutupan hutan alam dan teridentifikasi menggunakan citra satelit dan peta klasifikasi penutupan lahan dari Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, kajian ini menganalisa struktur kepemilikan Adindo dan para pemegang saham korporatnya guna mengidentifikasi keterkaitan dengan perusahaan dan perorangan yang berkaitan dengan APRIL, Grup RGE, dan pemilik manfaatnya. Metode dan data yang digunakan untuk setiap bagian analisis diuraikan di bawah ini.

Analisis Deforestasi di Areal Konsesi Adindo

Deforestasi di areal konsesi Adindo terdeteksi menggunakan peta klasifikasi penutupan lahan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan data kehilangan tutupan pohon global yang diterbitkan oleh University of Maryland berdasarkan citra Landsat dari satelit NASA. Untuk menghasilkan perkiraan konservatif akan luas deforestasi yang terjadi, maka peta klasifikasi penutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan⁷ ditumpangtindihkan dengan data kehilangan tutupan pohon global dari University of Maryland.⁸ Klasifikasi penutupan lahan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digabung menjadi satu indikator.⁹

Data kehilangan tutupan pohon global diterbitkan oleh University of Maryland secara tahunan, dan metodologi yang digunakan tersedia untuk umum dan diterima secara luas oleh komunitas ilmuwan. Analisis menggunakan sistem siap siaga GLAD¹⁰ dari University of Maryland, bukan peta kehilangan tutupan pohon tahunan, supaya memisahkan tahun 2015 ke dalam periode pra dan pasca komitmen keberlanjutan, dan agar analisis dapat diperpanjang untuk mencakup paruh pertama tahun 2020. Temuan dibenarkan melalui pengecekan silang menggunakan citra Sentinel dari satelit milik European Space Agency, bersama dengan situs web Global Forest Watch¹¹, yang terbuka untuk umum dan dikelola oleh World Resources Institute (WRI), serta *Borneo Deforestation Atlas* yang diterbitkan oleh Center for International Forestry Research (CIFOR).¹²

Analisis terhadap deforestasi di areal yang ditetapkan sebagai Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dilakukan dengan cara membandingkan areal hutan alam yang dibuka selama periode kajian dengan areal NKT yang dinyatakan dalam ringkasan eksekutif penilaian Nilai Konservasi Tinggi untuk Adindo yang dilakukan oleh Tropenbos International pada tahun 2014.¹³

Analisis terhadap deforestasi di lahan gambut dilakukan dengan cara membandingkan areal hutan alam yang dibuka selama periode kajian dengan batas kesatuan hidrologis gambut yang ditetapkan dalam peta fungsi ekosistem gambut nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017.¹⁴

7 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2000–2015. Peta penutupan lahan Indonesia. Diakses pada tanggal 1 Juli 2020. <http://webgis.menlhk.go.id:8080/pl/pl.htm>.

8 Hansen, M. C. et al. 2020. *Annual tree cover loss. Global Land Analysis and Discovery*. College Park, Maryland: University of Maryland. <http://earthenginepartners.appspot.com/google.com/science-2013-global-forest>.

9 Klasifikasi ini meliputi: hutan lahan kering primer; hutan lahan kering sekunder; hutan rawa primer; hutan rawa sekunder; hutan mangrove primer; hutan mangrove sekunder. Di Indonesia, hutan sekunder adalah hutan terdegradasi yang seringkali masih memiliki fungsi ekosistem dan nilai ekologis.

10 Hansen, M. C. et al. 2020. *GLAD Alerts. Global Land Analysis and Discovery*. College Park, Maryland: University of Maryland. <https://glad.umd.edu/gladmaps/globalmap.php>.

11 *Global Forest Watch*. 2020. World Resources Institute. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020. <https://www.globalforestwatch.org/>.

12 Center for International Forestry Research. *Atlas of Deforestation and Industrial Plantations in Borneo*. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020. <https://atlas.cifor.org/borneo/>.

13 Tropenbos International. 2014. Ringkasan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014 untuk PT Adindo Hutani Lestari. Bogor, Indonesia. <https://sustainability.aprilasia.com/en/pt-adindo-hutani-lestari/>.

14 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, 2017, SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia.

Analisis terhadap Keterkaitan Korporat antara APRIL dan Adindo

Analisis terhadap struktur kepemilikan korporat Adindo didasarkan kajian terhadap profil perusahaan PT Adindo Hutani Lestari¹⁵ dan pemegang saham langsung dan tidak langsungnya. Profil-profil tersebut memuat daftar pemegang saham, komisaris, dan direktur untuk setiap perusahaan yang berdomisili di Indonesia. Sumber utama untuk dokumentasi yang digunakan dalam analisis tersebut adalah profil pendaftaran korporat resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, selanjutnya Ditjen AHU di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk setiap badan hukum di dalam struktur kepemilikan langsung dan tidak langsung Adindo, komposisi pemegang saham mayoritas dan minoritas dianalisa untuk mengetahui potensi keterkaitan dengan APRIL dan/atau Grup RGE. Pada kasus di mana ekuitas dalam satu perusahaan dipegang oleh badan korporat lain, maka kepemilikan perusahaan induk tersebut kemudian dianalisa guna mengidentifikasi keterkaitan yang dimaksud. Pada beberapa kasus, berbagai lapisan perusahaan induk dianalisa guna mengidentifikasi pihak yang menjadi pemegang saham kendali. Secara keseluruhan, dokumen pendaftaran korporat dari Ditjen AHU dianalisa untuk 10 perusahaan yang terdaftar di Indonesia, dan dokumen tersebut masih berlaku per tanggal 30 Juni 2020.

Analisis terhadap keterkaitan antara perusahaan induk yang berkaitan dengan Adindo dan berbasis di luar wilayah yurisdiksi Indonesia dengan APRIL, Grup RGE, dan/atau pemilik manfaatnya umumnya didasarkan pada data yang diterbitkan di Basis Data Offshore Leaks oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Data tersebut terdiri dari informasi yang diambil dari dokumen pendaftaran korporat dan dokumen lain yang terungkap di Offshore Leaks dan Paradise Papers.¹⁶ Sumber lain adalah dokumen pendaftaran korporat dari luar Indonesia, prospektus perusahaan, dan laporan tahunan dari organisasi afiliasi RGE, seperti Tanoto Foundation.

Terakhir, pada alamat yang terdaftar untuk setiap perusahaan yang berdomisili di Indonesia, masa lalu dan masa kini, dilakukan referensi silang dengan lokasi yang sudah diketahui sebagai alamat kantor APRIL dan Grup RGE, seperti kantor pusat grup di Jakarta dan beberapa gedung lain di Jakarta dan Medan yang pernah menjadi alamat kantor perusahaan afiliasi RGE.

Perlu dicatat bahwa bagan struktur perusahaan yang disajikan di laporan ini belum mencakup semua pejabat dan pemegang saham – baik yang mantan maupun yang masih aktif – yang dikaji dalam analisis ini. Selain itu, semua klaim mengenai dokumentasi atau dugaan akan keterkaitan antara para pemegang saham, komisaris, dan/atau direktur perusahaan yang dianalisa dalam laporan ini didasarkan, setidaknya sebagian, pada korespondensi antara nama pihak yang terdaftar di dokumen pendaftaran korporat dari Ditjen AHU dan nama pihak yang dilaporkan atau diduga sebagai pemilik, pejabat atau karyawan (yang mantan maupun yang masih aktif) di badan hukum afiliasi APRIL dan/atau Grup Royal Golden Eagle.

Secara hipotetis, terdapat kemungkinan bahwa berbagai orang mempunyai nama yang sama, terutama dengan nama yang bersifat umum. Oleh karena itu, bila memungkinkan, tanggal lahir dicocokkan antara dokumen pendaftaran perusahaan dan sumber lain guna meminimalkan kemungkinan akan terjadi kekeliruan.

15 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020. PT Adindo Hutani Lestari. Profil Perusahaan. Diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

16 International Consortium of Investigative Journalists. 2020. Basis Data Offshore Leaks. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020. <https://offshoreleaks.ijc.org/>.

III. Komitmen “Nol Deforestasi” Grup APRIL

Pabrik APRIL di Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu pabrik pulp terbesar di dunia. Pabrik tersebut dapat memproduksi dua jenis pulp, yaitu: kraft pulp kayu dikelantang (*bleached hardwood kraft pulp*, atau BHKP), yang digunakan untuk memproduksi kertas dan kertas karton; dan pulp larut, yang digunakan dalam produksi serat viscose (VSF) untuk tekstil sintetis. Menurut laporan APRIL, kapasitas produksi pulpanya paling kurang 3,0 juta ton per tahun, dan memerlukan sekitar 13,5 juta meter kubik (m³) serat kayu setiap tahunnya.

Dari pertengahan tahun 1990-an sampai pertengahan tahun 2010-an, sebagian bahan baku kayu yang diolah di pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci berupa kayu rimba campuran yang berasal dari kegiatan pembukaan hutan alam. Selama periode tersebut, APRIL sering menuai kritik dari lembaga-lembaga lingkungan karena mengakibatkan pemusnahan hutan hujan tropis.¹⁷ Pada Agustus 2013, Forest Stewardship Council (FSC) memutuskan hubungan dengan APRIL setelah menerima pengaduan “yang diajukan oleh Greenpeace, WWF-Indonesia dan Rainforest Action Network . . . karena terlibat dalam kegiatan deforestasi berskala besar di Indonesia yang membawa dampak sosial dan lingkungan hidup yang buruk pada areal bernilai konservasi tinggi.”¹⁸ Selama beberapa tahun terakhir, pemangku kepentingan mengkritik APRIL karena mengembangkan hutan tanaman di lahan gambut yang luas dan kaya akan karbon, sehingga ikut menyebabkan kebakaran dan emisi gas rumah kaca yang signifikan di Indonesia¹⁹; dan konflik dengan masyarakat setempat yang tinggal di dalam dan sekitar batas areal konsesi perusahaan pemasok APRIL.²⁰

Pada bulan Juni 2015, perusahaan induk APRIL, Royal Golden Eagle (RGE), menerapkan *Forestry, Fibre, Pulp & Paper Sustainability Framework* (Kerangka Kerja Keberlanjutan Hutan, Serat, Pulp & Kertas) yang menonjolkan komitmen “nol deforestasi” untuk seluruh anak perusahaan.²¹ Komitmen tersebut, yang diperbaharui pada Oktober 2017, berlaku untuk semua perusahaan RGE di seluruh dunia dan untuk semua perusahaan pihak ketiga yang memasok serat, kayu, dan pulp kepada perusahaan RGE. Pada 3 Juni 2015, Grup APRIL juga menerapkan *Sustainable Forest Management Policy* (SFMP) atau Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2.0 (SFMP 2.0).

Berdasarkan kerangka kerja tersebut, APRIL mengumumkan komitmen bahwa, “Berlaku efektif segera, APRIL dan para pemasoknya hanya akan mengembangkan wilayah yang tidak berhutan, sesuai hasil identifikasi melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) yang independen dan dinilai oleh rekan sejawat [. . . dan] APRIL tidak akan mengakuisisi lahan baru, atau surat izin kehutanan lainnya, atau menerima kayu dari lahan pihak ketiga, di mana penjualnya setelah tanggal 3 Juni 2015 diketahui telah membuka lahan di hutan NKT atau SKT, maupun lahan gambut yang berhutan.”²²

17 Eyes on the Forest. 2012. *Asia Pacific Resources International Limited (APRIL): Riau, Sumatra's biggest forest pulper 2009 to 2012*. December 2012. <https://www.eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/Eyes-on-the-Forest-Investigative-Report-APRIL-Riau-Sumatras-biggest-forest-pulper-2019-to-2012.pdf>.

18 FSC International. 2020. “Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. Group (APRIL)” Unacceptable Activities, Cases website. Accessed on September 16, 2020. <https://fsc.org/en/unacceptable-activities/cases/asia-pacific-resources-international-holdings-ltd-group-april>

19 Koalisi Anti Mafia Hutan. 2019. *Perpetual Haze: Pulp production, peatlands, and the future of fire risk in Indonesia*. November 2019.

20 Environmental Paper Network *et al.* 2019. *Conflict Plantations: Revealing Asia Pacific Resources International Limited's trail of disputes across Indonesia*. November 2019. <https://environmentalpaper.org/wp-content/uploads/2019/09/APRIL-social-conflicts-mapping.pdf>.

21 Royal Golden Eagle. 2015. *Kerangka Kerja Keberlanjutan Hutan, Serat, Pulp & Kertas*. Situs web RGEI. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2020. <https://www.rgei.com/sustainability/sustainability-framework>.

22 APRIL. 2015. *Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2,0 Grup APRIL*. 2 Juni 2015. Diakses pada tanggal 6 September 2020. https://www.aprilasia.com/images/pdf_files/april-sfmp2-3-june-2015.pdf.

Selain itu, APRIL juga mengumumkan komitmen untuk “mengimplementasikan praktek-praktek pengelolaan terbaik di lahan gambut yang mendukung target Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memelihara nilai-nilai konservasi yang lain.” Lebih spesifik lagi, APRIL berkomitmen untuk “Tidak ada pengembangan baru di lahan gambut yang berhutan oleh APRIL dan para pemasoknya.”²³

Pada 2014, APRIL membentuk Komite Penasehat Pemangku Kepentingan atau *Stakeholder Advisory Committee* (SAC) untuk memantau pelaksanaan komitmen keberlanjutannya. APRIL juga menugaskan KPMG Performance Registrar Inc. (KPMG) untuk menyiapkan serangkaian “laporan jaminan terbatas” yang mencakup “indikator kinerja terpilih berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (SFMP) 2,0 oleh Grup APRIL.”

Gambar 1: Ekskavator menimbun kayu bulat di lahan gambut di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari pada bulan Januari 2015 sebelum komitmen SFMP 2.0 APRIL mulai berlaku



Sumber: Ulet Ifansasti/Greenpeace

23 APRIL. 2015. Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2,0 Grup APRIL. 2 Juni 2015. Diakses pada tanggal 6 September 2020. https://www.aprilasia.com/images/pdf_files/april-sfmp2-3-june-2015.pdf.

IV. Peran Adindo sebagai Pemasok untuk APRIL

Sejak APRIL menerapkan komitmen SFMP 2.0 pada 2015, Adindo termasuk lima pemasok kayu pulp terbesar – dari sedikitnya 30 pemasok – dari segi volume pengiriman bahan baku kayu ke perusahaan yang mengelola pabrik pulp APRIL, yaitu PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP). Menurut laporan pemenuhan bahan baku kayu yang diajukan oleh pabrik RAPP kepada Pemerintah Indonesia, perusahaan tersebut menerima lebih dari setengah juta meter kubik (m³) kayu per tahun dari Adindo pada tahun 2016, 2018, dan 2019, dan hampir setengah juta m³ kayu pada tahun 2017.²⁴

Secara keseluruhan, pabrik APRIL di Pangkalan Kerinci memperoleh lebih dari 2,3 juta m³ kayu dari Adindo selama tahun 2015–2019, atau setara dengan 79.000 truk kayu (lihat Tabel 1).²⁵ Menurut laporan pemenuhan bahan baku kayu yang diajukan oleh RAPP, seluruh kayu pulp yang diperoleh dari Adindo selama tahun 2015–2019 diklasifikasi sebagai kayu yang berasal dari hutan tanaman industri.

Tabel 1. Pasokan kayu pulp dari PT Adindo Hutani Lestari ke pabrik APRIL di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau

Tahun	Volume (m3)
2015	207.247
2016	569.006
2017	474.276
2018	587.783
2019	538.041
Total	2.376.353

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015–2019. “PT Riau Andalan Pulp and Paper.” Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

24 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016–2019. “PT Riau Andalan Pulp and Paper.” Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

25 Perkiraan ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap truk yang mengangkut kayu pulp ke pabrik APRIL rata-rata membawa 30 m³ kayu.

V. Deforestasi di Areal Konsesi Adindo

Analisis citra satelit mengindikasikan laju kehilangan hutan yang signifikan di dalam areal konsesi Adindo setelah komitmen SFMP 2.0 mulai berlaku pada tanggal 3 Juni 2015. Analisis ini memperkirakan bahwa sekitar 7.291 ha hutan alam atau setara dengan 10.000 lapangan sepak bola telah ditebang dari tanggal 3 Juni 2015 sampai 31 Agustus 2020 (lihat Gambar 2 dan Tabel 2). Dalam tiga tahun selama periode yang dianalisa – paruh kedua tahun 2015, 2017, dan 2018 – luas deforestasi lebih dari 1.500 ha setiap tahunnya. Adapun pada tahun 2016 dan 2019, luas deforestasi di atas 500 ha per tahun. Pada akhir periode analisis di bulan Juni 2020, hutan alam yang masih tersisa di areal konsesi Adindo diperkirakan seluas 61.334 ha.

Secara signifikan, Koalisi yang menerbitkan laporan ini belum melihat adanya bukti Adindo bayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu alam yang dipungut dari tahun 2016 sampai bulan Agustus 2020, meskipun luasnya deforestasi yang terjadi sebagaimana didokumentasikan.²⁶ Basis data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat diakses oleh publik mengenai pembayaran berbagai jenis pungutan kehutanan mengindikasikan bahwa Adindo hanya melaporkan pemanenan pohon akasia, yaitu pohon hutan tanaman, selama periode tersebut. Iuran yang dikenakan oleh Pemerintah Indonesia atas pemungutan hasil hutan alam jauh lebih tinggi daripada iuran atas kayu yang berasal dari hutan tanaman.

Bagi APRIL, tidak semua deforestasi dalam areal konsesi Adindo dianggap sebagai pelanggaran kebijakan keberlanjutannya. Komitmen SFMP 2.0 APRIL membatasi pelanggaran pengrusakan hutan hanya di tempat yang ditetapkan sebagai areal Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau Stok Karbon Tinggi (SKT) (lihat sub judul di atas, 'Komitmen "nol deforestasi" Grup APRIL').²⁷ Masalahnya, menurut pemeriksaan kami, penilaian SKT

Tabel 2. Deforestasi di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari selama periode 3 Juni 2015 sampai 31 Agustus 2020

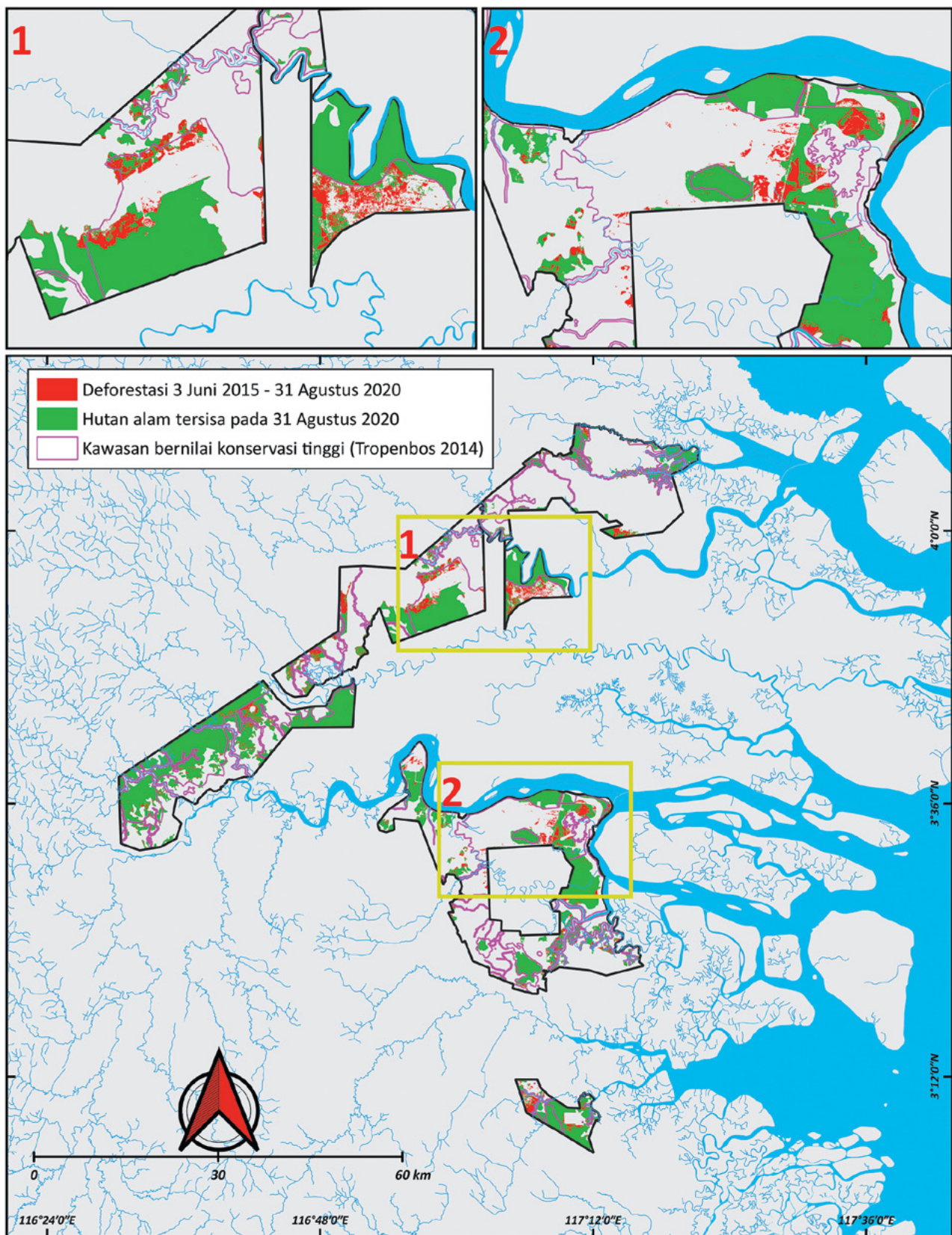
	2015 (setelah tanggal 3 Juni)	2016	2017	2018	2019	2020 (sampai tanggal 31 Agustus)	Jumlah
Deforestasi (hektar)	1.914	704	1.941	1.519	644	570	7.291
Deforestasi di areal NKT (ha)	1.418	283	1.262	326	237	243	3.769
Deforestasi di areal gambut (hektar)	1.444	302	1.325	261	226	232	3.790
Deforestasi di zona lindung gambut (hektar)	956	128	911	24	30	93	2.141

Sumber: Peta penutupan lahan tahun 2000–2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tersedia di: <http://webgis.menlhk.go.id:8080/pl/pl.htm>; Laju kehilangan tutupan hutan dari Hansen *et al.* 2013. "High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change." *Science* 342 (15 November): 850–53; dengan update sampai tahun 2017, tersedia di: https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-globalforest/download_v1.5.html. *GLAD forest loss alerts* tersedia di <https://glad.umd.edu/dataset/glad-forest-alerts>. Peta lahan gambut dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2017. Ringkasan eksekutif dari penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT Adindo Hutani Lestari tahun 2014 oleh Tropenbos International.

26 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Pemanfaatan Hutan Produksi. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 2020. "PT Adindo Hutani Lestari." Dashboard SI-PNBP. Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan. Diakses pada 22 September 2020. http://sipnbp.phpl.menlhk.net:8080/simpnbp/home_dashboard.

27 Grup APRIL. 2015. "Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2,0 Grup APRIL." 3 Juni 2015. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020. <https://www.aprilasia.com/en/sustainability/sustainability-policy>.

Gambar 2. Deforestasi di areal konsesi PT Adindo Hutan Lestari selama 3 Juni 2015 sampai 31 Agustus 2020, dan hutan yang masih tersisa per 31 Agustus 2020



Sumber: Peta penutupan lahan tahun 2000–2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tersedia di: <http://webgis.menlhk.go.id:8080/pl/pl.htm>; Laju kehilangan tutupan hutan dari Hansen *et al.* 2013. "High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change." *Science* 342 (15 November): 850–53; dengan *update* sampai tahun 2017, tersedia di: https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-globalforest/download_v1.5.html. *GLAD forest loss alerts* tersedia di <https://glad.umd.edu/dataset/glad-forest-alerts>.

nampaknya belum pernah dilakukan di areal konsesi Adindo. APRIL tidak mengumumkan adanya penilaian SKT itu di situs webnya, dan tidak ada informasi apapun mengenai penilaian SKT di areal konsesi Adindo di ranah publik.²⁸

Yang sudah tersedia di situs web APRIL adalah tautan pada ringkasan eksekutif laporan penilaian Nilai Konservasi Tinggi Adindo yang dilakukan oleh Tropenbos International pada 2014 (lihat Lampiran A).²⁹ Namun dari pemeriksaan ke basis data situs web High Conservation Value (HCV) Resource Network, sepertinya penilaian NKT itu belum pernah ditinjau oleh organisasi tersebut.³⁰ (Sepertinya, belum ada pemasok kayu APRIL satupun yang sudah menyampaikan penilaian NKT untuk ditinjau oleh HCV Resource Network, meskipun APRIL menjadi anggota Network tersebut dan saat ini menjadi anggota Komite Manajemennya.)³¹

Beberapa peta dalam dokumen penilaian Tropenbos didigitasi guna menentukan apakah ada deforestasi di konsesi Adindo yang terjadi di areal yang ditetapkan oleh Tropenbos sebagai NKT.³² Analisis ini menemukan bahwa ternyata 3.769 ha deforestasi – lebih dari separuh total kehilangan hutan di areal konsesi Adindo – terjadi di areal NKT (lihat Gambar 2 dan Tabel 2). Deforestasi di areal NKT itu mencapai puncaknya pada paruh kedua tahun 2015, segera setelah komitmen mulai berlaku^{33,34} dan memuncak lagi pada tahun 2017. Adapun pada 2016, 2018, 2019, dan paruh pertama 2020, lebih dari 230 ha deforestasi terjadi di dalam areal NKT setiap tahunnya.

Hampir semua deforestasi yang terjadi di areal NKT berada di lokasi yang ditetapkan sebagai areal “tanaman pokok dengan *water management*” di peta dalam penilaian Tropenbos. Sepertinya terminologi ini mengacu pada areal lahan gambut yang telah ditentukan memiliki Nilai Konservasi Tinggi dan yang telah ditetapkan oleh pemilik izin konsesi untuk pengembangan hutan tanaman kayu pulp. Pembukaan hutan alam di areal tersebut seharusnya mendiskualifikasi Adindo sebagai pemasok bahan baku kayu yang diterima oleh APRIL, karena komitmen keberlanjutan grup tersebut menyatakan bahwa APRIL tidak akan menerima kayu “di mana penjualnya setelah tanggal 3 Juni 2015 diketahui membuka lahan di hutan NKT atau SKT, maupun lahan gambut yang berhutan.”³⁵

28 APRIL. 2020. “PT Adindo Hutani Lestari.” *Sustainability Dashboard APRIL*. Grup APRIL. Diakses pada tanggal 3 September 2020. <https://sustainability.aprilasia.com/en/>. Penilaian SKT seharusnya dilakukan dengan menggunakan metodologi Pendekatan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock Approach) dan diajukan untuk peninjauan oleh rekan sejawat dengan Pendekatan Stok Karbon Tinggi.

29 Tropenbos International. 2014. High Conservation Value Assessment summary 2014 of PT Adindo Hutani Lestari. Bogor, Indonesia.

30 HCV Resource Network. 2020. *Find a Report*. Diakses pada tanggal 3 September 2020. <https://hcvnetwork.org/find-a-report/>.

31 HCV Resource Network. 2020. *Find a Report*. *Op. cit.*

32 Meskipun proses digitasi peta yang berasal dari file PDF berkualitas rendah bukanlah praktek terbaik dalam analisa SIG, karena tidak ada pilihan lain metode ini terpaksa digunakan sehingga penulis menyadari bahwa hasilnya dapat mengandung bias. APRIL dan para pemasoknya dianjurkan untuk menyediakan peta NKT di dalam batas areal konsesinya dalam format digital yang memungkinkan analisis SIG supaya bias dapat dihindari pada analisis di masa mendatang.

33 Beberapa saat setelah APRIL menerapkan komitmen SFMP 2.0 pada tahun 2015, koalisi LSM bernama Eyes on the Forest (EoF) menerbitkan hasil investigasi yang memperlihatkan deforestasi di areal konsesi Adindo setelah komitmen mulai berlaku (lihat Eyes on the Forest. “APRIL supplier violates new forest policy, peatland forests in Borneo cleared after moratorium issued.” 22 Juni 2015). Tanggapan APRIL saat itu menyatakan bahwa investigasi EoF keliru dalam pengidentifikasian pohon deforestasinya karena pohon tersebut sudah ditebang sebelum tanggal pemberlakuan, namun belum diangkat dari lahan. Analisis ini tidak mencakup deforestasi yang terjadi dari tanggal 15 Mei 2015 sampai 3 Juni 2015 karena dua alasan. Pertama, dengan hal tersebut dapat dipastikan bahwa areal di mana pohon dipanen sebelum tanggal pemberlakuan tidak termasuk dalam estimasi deforestasi. Kedua, kebijakan APRIL belum jelas mengenai tanggal pemberlakuan, apakah itu tanggal 15 Mei atau 3 Juni 2015. Terkait kedua hal tersebut, analisis ini diusahakan supaya konservatif.

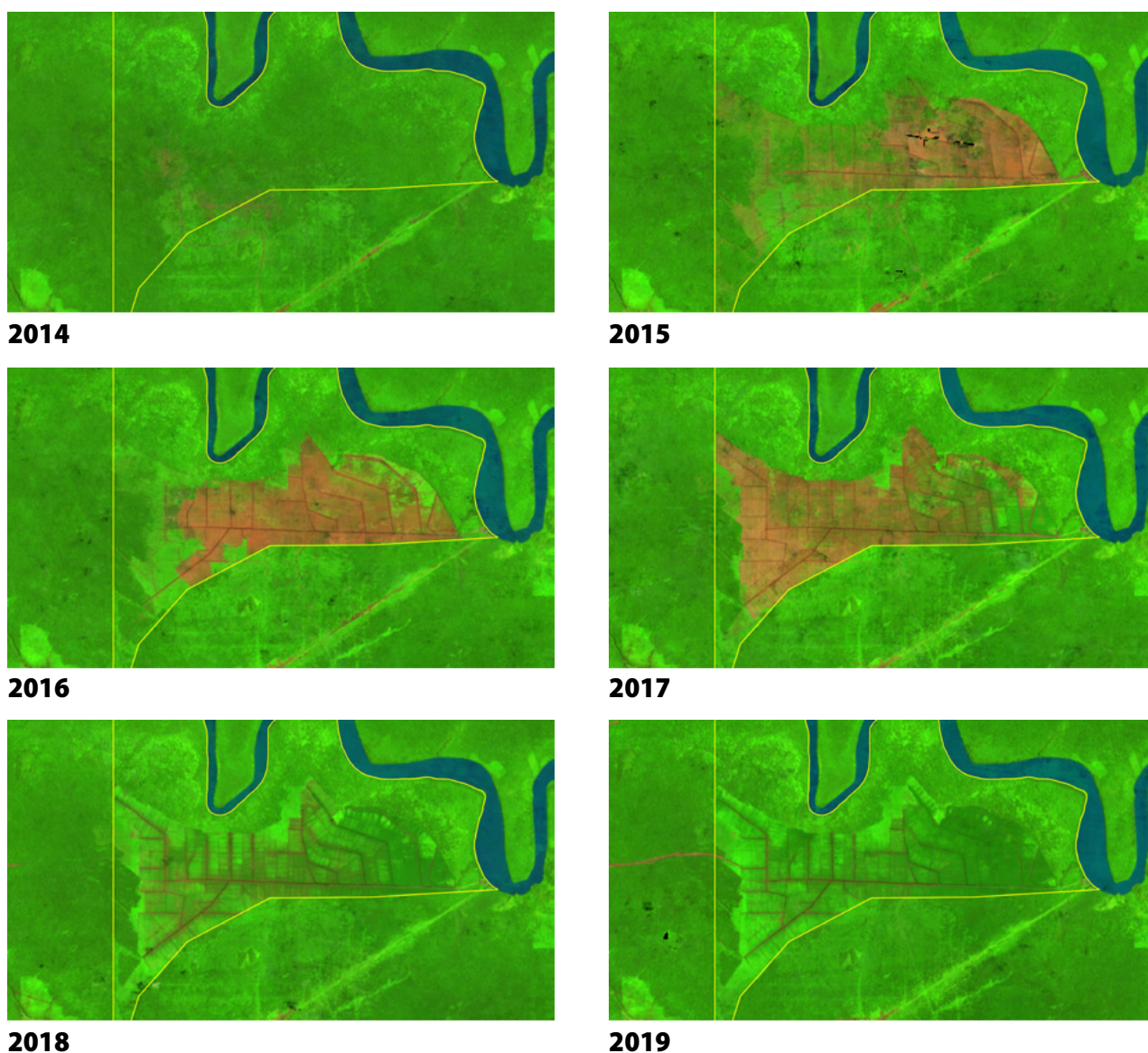
34 Dalam laporan interim yang diterbitkan pada bulan Maret 2016, KPMG mendokumentasikan ketidakpatuhan di mana “pengembangan lahan gambut berhutan dan pemungutan kayu rimba campuran terkait terjadi di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari di Kalimantan setelah tanggal moratorium yang ditetapkan dalam SFMP 2.0 APRIL.” Menurut KPMG, “Ketidakpatuhan belum bersifat serius karena menyangkut satu kejadian tunggal, dan luas areal terdampak hanya sekitar 0,02% dari luas areal konsesi pemasok tersebut.”

35 Grup APRIL. 2015. *Op. cit.*

Sepertinya beberapa wilayah mengalami deforestasi untuk kegiatan penanaman kelapa sawit dan/atau pertanian oleh masyarakat setempat. Namun demikian, perluasan hutan tanaman industri juga terlihat dari citra satelit di berbagai wilayah yang mengalami deforestasi. Pada beberapa kasus, seperti pembukaan lahan di bagian timur utara, hutan sudah terdegradasi sebelum komitmen berlaku karena penggalian kanal dalam kegiatan pengeringan lahan gambut. Penghilangan hutan yang terdeteksi di lokasi tersebut setelah komitmen dimulai termasuk penebangan sisa-sisa pohon supaya hutan tanaman pulp dapat dikembangkan (lihat Gambar 3). Pada kasus lain, hutan sehat dibuka setelah komitmen “nol deforestasi” APRIL berlaku. Hal ini sepertinya terjadi di areal NKT di bagian utara konsesi yang dibuka untuk pengembangan hutan tanaman pulp (lihat Gambar 4).

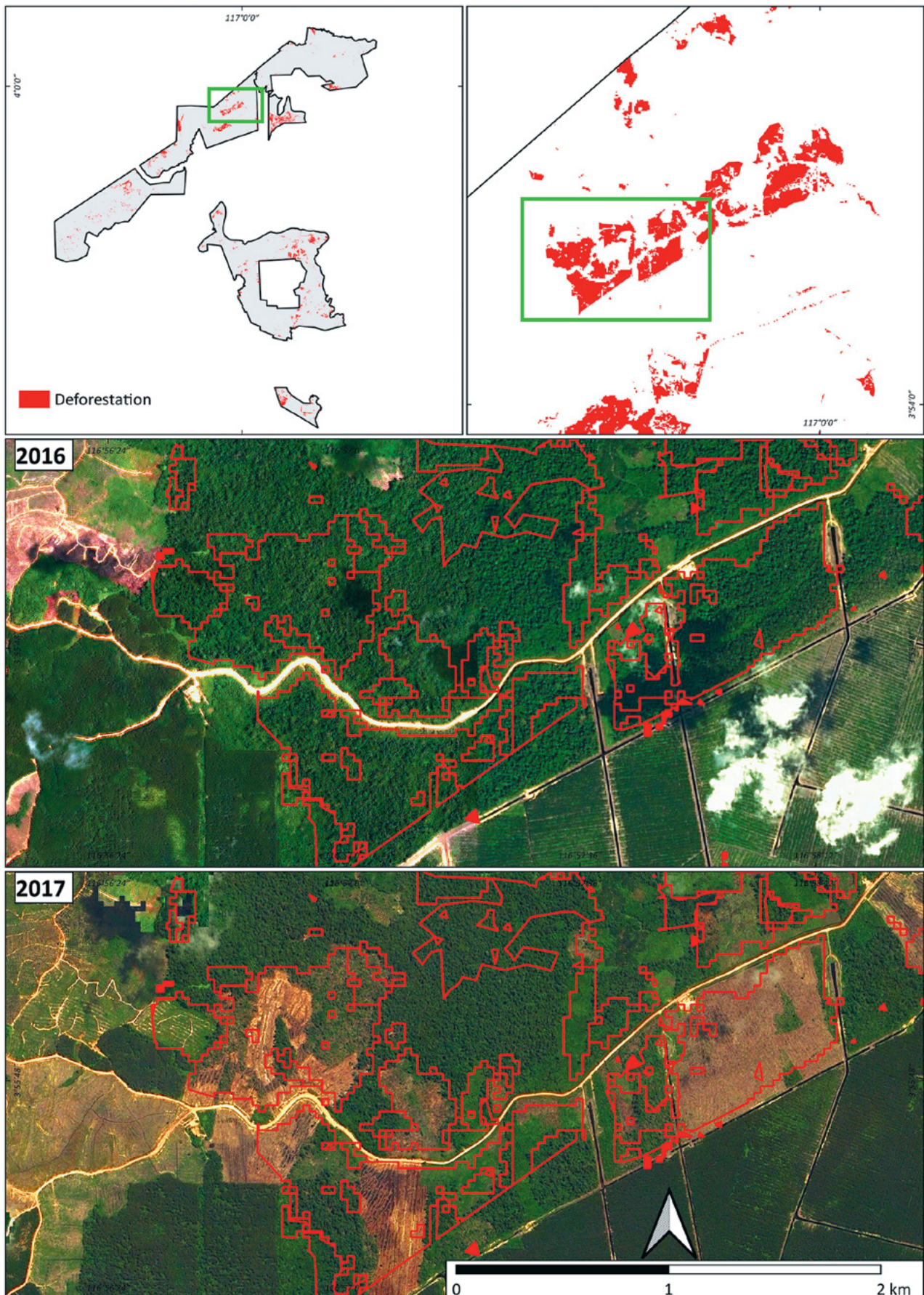
Dalam tanggapannya terhadap temuan ini, APRIL mengklaim bahwa: “Antara tanggal 3 Juni 2015 sampai 31 Agustus 2020, 8.387 hektar hutan tanaman dikembangkan di PT AHL (Adindo Hutani Lestari). Tidak ada pengembangan di areal yang telah diidentifikasi sebagai NKT. . . . Proses penyiapan lahan untuk seluruh 8.387 hektar hutan tanaman sudah dikerjakan sebelum tanggal 15 Mei 2015, sebagaimana diverifikasi oleh PT Hatfield Indonesia, yaitu konsultan lingkungan hidup dengan keahlian di bidang penginderaan jauh. Analisis Hatfield membenarkan bahwa areal tersebut merupakan areal bukan NKT yang dibuka sebelum batas tanggal pemberlakuan SFMP 2.0 APRIL pada tanggal 15 Mei” (lihat Lampiran E).

Gambar 3. Rangkaian waktu pengembangan HTI di lahan gambut berhutan 2014–2019



Sumber: Citra Landsat

Gambar 4. Citra beresolusi tinggi yang memperlihatkan pembukaan hutan di lahan gambut di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari dari tahun 2016 sampai 2017



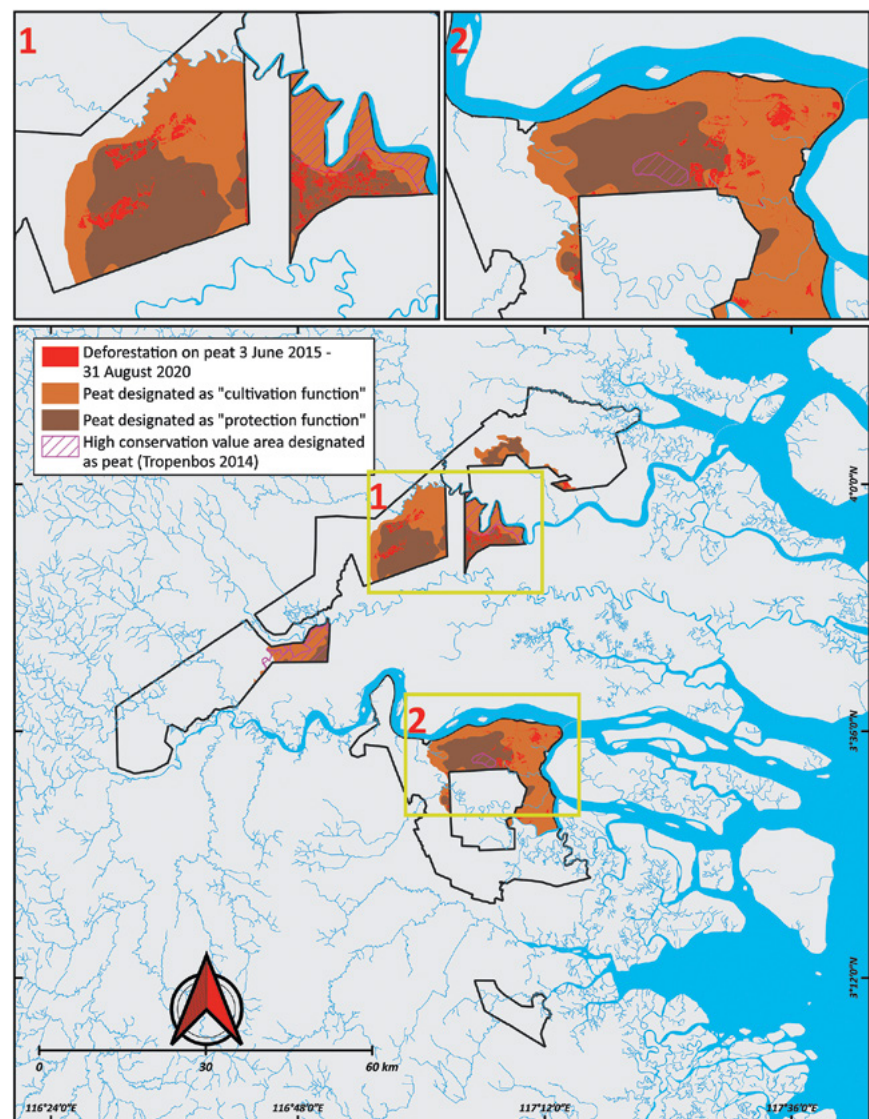
Sumber: Citra SPOT

VI. Pembukaan Hutan di Lahan Gambut di Konsesi Adindo

Berdasarkan peta gambut yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017, sebagian besar pembukaan hutan yang terjadi di areal konsesi Adindo sejak tanggal 3 Juni 2015 – yaitu 3.790 ha dari total deforestasi seluas 7.291 ha – terjadi di lahan gambut (lihat Gambar 5). Ini mengejutkan mengingat Indonesia pernah mengalami bencana kebakaran di lahan gambut yang telah dikeringkan pada paruh kedua tahun 2015, yang mengakibatkan asap pekat yang menyelimuti berbagai wilayah di Indonesia bagian barat, Singapura, dan Malaysia. Perlu dicatat bahwa kegiatan pembukaan hutan di lahan gambut masih dilakukan oleh Adindo selama tahun 2016 dan mencapai puncaknya, di atas 1.000 ha, pada tahun 2017. Pada tahun 2018, 2019, dan paruh pertama tahun 2020, kegiatan pembukaan hutan atas lahan gambut tetap berlangsung di dalam areal konsesi Adindo, dan melebihi 200 ha per tahun pada setiap tahun tersebut (lihat Gambar 6 sebagai contoh).

Untuk menanggapi kebakaran hutan dan lahan pada 2015, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang membatasi pengembangan areal penanaman baru di lahan gambut yang dikeringkan, dan di beberapa wilayah, mewajibkan perlindungan dan/atau rehabilitasi lahan gambut dengan kedalaman dan kondisi tertentu. Deforestasi seluas 2.141 ha terdeteksi di kawasan ekosistem gambut yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 2017 sebagai “fungsi lindung”.³⁶Namun, karena sifat peraturan Pemerintah tentang lahan gambut berubah-ubah selama beberapa tahun terakhir, maka

Gambar 5. Lahan gambut dan deforestasi di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari selama 3 Juni 2015 sampai 31 Agustus 2020



Sumber: Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, 2017, SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ringkasan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT Adindo Hutani Lestari tahun 2014 oleh Tropenbos International.

36 Sebagian deforestasi yang tercatat di kawasan ekosistem gambut “fungsi lindung” terjadi pada tahun 2015 dan 2016, yaitu sebelum status fungsi lindung ditetapkan oleh Pemerintah pada tahun 2017.

laporan ini tidak mengklaim bahwa wilayah tersebut dibuka secara ilegal dan/atau dikembangkan dengan cara yang melanggar peraturan tersebut.

Temuan lain dari analisis ini adalah penilaian NKT yang dilakukan oleh Tropenbos pada tahun 2014 gagal mengidentifikasi sebagian besar lahan gambut secara akurat di dalam areal konsesi Adindo (lihat Gambar 5). Menurut Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terbitan tahun 2017, lahan gambut di dalam areal konsesi Adindo seluas 55.492 ha. Sedangkan, penilaian NKT baru mengidentifikasi 7.693 ha lahan gambut di dalam areal konsesi yang sama, atau hanya 14 persen dari luas areal gambut yang terdokumentasikan oleh Kementerian. Sebagaimana dibahas di atas, sepertinya peta NKT Tropenbos menetapkan sebagian areal lahan gambut sebagai ‘tanaman pokok dengan water management’, tanpa menentukannya sebagai lahan gambut.

Kelalaian dalam penilaian luas areal lahan gambut yang begitu besar itu memunculkan kekhawatiran akan keabsahan penilaian NKT oleh Tropenbos. Lebih jauh lagi, kurang teridentifikasinya lahan gambut dalam penilaian NKT di konsesi Adindo – ditambah dengan kegagalan yang jelas untuk melakukan penilaian SKT untuk Adindo – menimbulkan kekhawatiran mendasar tentang integritas yang dengannya komitmen keberlanjutan SFMP 2.0 APRIL sedang dilaksanakan dan dipantau. Bagaimanapun, keseluruhan kebijakan “nol-deforestasi” APRIL tergantung pada pengidentifikasian hutan NKT dan SKT. Penentuan luas lahan gambut yang terlalu rendah di penilaian NKT Adindo dan pembukaan hutan gambut juga menimbulkan pertanyaan serius tentang peran Kelompok Kerja Ahli Gambut Independen APRIL. Kelompok tersebut didirikan sebagai penasihat APRIL dalam upaya perbaikan pengelolaan lahan gambut sepanjang rantai pasokannya.³⁷

Lebih luasnya, suatu hal yang sangat memprihatinkan adalah komitmen SFMP 2.0 APRIL sepertinya memungkinkan perusahaan dan para pemasoknya untuk membuka areal hutan alam yang luas apabila hutan tersebut tidak diklasifikasi secara spesifik sebagai hutan NKT. Telah didokumentasikan bahwa hutan terdegradasi pun seringkali mempunyai nilai penting sebagai pendukung habitat alam dan ekosistem, serta bernilai penting terkait budaya. High Conservation Value Network menggarisbawahi hal tersebut dalam pedoman ‘HCV Common Guide’:

“Perlu dicatat bahwa ketiadaan NKT saja tidak dapat digunakan untuk menjustifikasi alih guna lahan pada ekosistem alami; ada kemungkinan bahwa terdapat nilai-nilai lingkungan dan sosial lainnya yang patut dilindungi.”³⁸

Gambar 6. Foto-foto pembukaan lahan pada September 2020 di lahan gambut yang telah deforestasi di areal konsesi PT Adindo Hutani Lestari



Sumber: Green of Borneo, 2020, Lokasi: 3.911705N; 117.072943E

37 Grup APRIL. 2018. “Kelompok Kerja Ahli Gambut Independen (IPEWG) APRIL Terbitkan Laporan Pencapaian Fase 1.” Inside RGE. 13 Juli 2018. <https://www.inside-rge.com/sustainable-operations/april-peatland-ipewg-publishes-first-progress-report/>.

38 HCV Resource Network. 2013. Panduan Umum untuk Nilai Konservasi Tinggi. https://hcvnetwork.org/wp-content/uploads/2018/03/HCVCommonGuide_Bahasa_07-17-web.pdf.

VII. Kelindan Korporat antara APRIL dan Adindo

APRIL mengklaim bahwa Adindo adalah perusahaan independen yang memasokkan kayu ke pabrik pulpnya melalui penjualan di pasar terbuka. Namun, jika dicermati, struktur korporat Adindo – sebagaimana akan dibahas di bagian berikutnya – ternyata memiliki banyak keterkaitan dengan Grup APRIL dan perusahaan induknya, Grup RGE. Keterkaitan tersebut terstruktur melalui jaringan perusahaan induk yang berdomisili di Indonesia dan di yurisdiksi *offshore* yang diketahui mengenakan tarif pajak rendah.

APRIL Menggambarkan Adindo sebagai “Pemasok Pasar Terbuka”

Pada peta dan dokumen yang tersedia di situs web keberlanjutannya, APRIL menggambarkan Adindo sebagai salah satu dari sembilan “Pemasok Pasar Terbuka” (lihat Gambar 7). Situs web APRIL menyatakan bahwa “Pemasok Pasar Terbuka adalah pemasok serat yang tidak berkontribusi pada komitmen [1-untuk-1 APRIL]³⁹ dan dikontrak untuk pembelian pasokan pasar terbuka.”⁴⁰ Sebaliknya, pemasok kayu APRIL lain digolongkan sebagai berikut: “konsesi milik PT RAPP” (yang diartikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh “perusahaan operasional Grup APRIL”); “Mitra Pemasok”⁴¹ (yang diartikan sebagai “pemasok serat kayu yang menjadi mitra kerja jangka panjang APRIL dan berkontribusi pada komitmen ‘1-untuk-1’-nya”); dan “Hutan Rakyat” (yang diartikan sebagai pemasok dari “masyarakat yang berada di dekat dan di sekitar daerah operasi [APRIL]”).⁴² APRIL menyatakan bahwa daftar pemasok ini adalah data yang diaudit “per tanggal 31 Agustus 2020”.

Selain itu, catatan dari rapat Komite Penasehat Pemangku Kepentingan APRIL pada bulan Juli 2018, yang tersedia di situs web APRIL, memuat pernyataan berikut: “Pemasok Pasar Terbuka: APRIL tidak memiliki afiliasi dengan pemasok pasar terbuka, kecuali PT ITCI Hutani Manunggal. PT Adindo Hutani Lestari bukan bagian dari Grup APRIL.”⁴³

Alasan seutuhnya yang mendasari upaya APRIL untuk menyampaikan kesan bahwa Adindo merupakan pemasok pihak ketiga yang bersifat independen masih belum jelas. Namun, APRIL pernah memanfaatkan kesan independensi dari Adindo untuk menjauhkan diri dari kontroversi. Pada bulan Desember 2015, ketika menanggapi investigasi oleh koalisi Eyes on the Forest yang menuduh Adindo melakukan deforestasi dan pengrusakan lahan gambut, kepada koran bahasa Inggris *The Jakarta Post*, Direktur Urusan Korporat APRIL, Agung Laksmiana menyatakan bahwa “PT AHL [Adindo Hutani Lestari] adalah pihak ketiga dan pemasok jangka pendek serat ke Grup APRIL/RAPP. Itu bukan bagian dari Grup APRIL/RAPP, dan kami tidak mempunyai hubungan legal apapun dengan PT AHL selain hubungan rantai pasokan.”⁴⁴

-
- 39 *Dashboard* keberlanjutan APRIL menjelaskan bahwa berdasarkan komitmen 1-untuk-1, “APRIL bertujuan untuk mengkonservasi atau merestorasi satu hektar hutan untuk setiap satu hektar hutan industri.”
- 40 APRIL. 2020. “Daftar Sumber Pasokan Serat Kayu APRIL per 31 Agustus 2020.” *Dashboard* keberlanjutan APRIL. Diakses pada tanggal 3 September 2020. <http://sustainability.aprilasia.com/en/april-fiber-supply-source/>.
- 41 Pada bulan Juli 2018, Komite Penasehat Pemangku Kepentingan APRIL menyatakan bahwa, “Mitra Pemasok: APRIL tidak memiliki afiliasi dengan mitra pemasok. Investor perusahaan mitra pemasok bukanlah karyawan maupun anggota manajemen APRIL. Sebagai pemegang lisensi, mereka mengelola masalah sosial dan lisensi. APRIL menyediakan modal kerja dan pembiayaan kehutanan kepada para pemasok untuk melakukan operasi kehutanan bersama. Pengaturan ini memungkinkan APRIL untuk memiliki pengawasan yang lebih besar terkait implementasi SFMP 2.0 oleh mitra pemasok.” (Catatan Rapat SAC 17-19 Juli 2018. https://www.aprilasia.com/images/pdf_files/meeting_updates/13th-SAC-Meeting-Report-17-19-July-2018.pdf)
- 42 APRIL. 2020. *Op cit*.
- 43 APRIL. 2018. “Rapat SAC XIII di Pangkalan Kerinci, Indonesia, 17-19 Juli 2018.” Komite Penasehat Pemangku Kepentingan perihal Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan APRIL (SFMP 2.0). Diakses pada tanggal 22 Januari 2020. <http://sustainability.aprilasia.com/en/13th-sac-meeting-report-17-19-july-2018/>.
- 44 Jong, Hans Nicholas. Laporan Temukan SVLK Gagal Menghentikan Pembalakan Liar. *Jakarta Post*. 23 Desember 2015. <https://www.thejakartapost.com/news/2015/12/23/report-finds-svlk-fails-stop-illegal-logging.html>.

Gambar 7. Peta Pemasok Pasar Terbuka APRIL yang terbit di “laporan jaminan” KPMG pada tahun 2018



Sumber: KPMG 2018.

Indikasi keterkaitan Adindo dengan APRIL dan Grup RGE

Meskipun APRIL berupaya untuk menggambarkan Adindo sebagai pemasok pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan Grup APRIL/RAPP, profil perusahaan yang resmi, data dari Basis Data *Offshore Leaks* dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), dan informasi lain yang terbuka untuk masyarakat umum mengindikasikan bahwa Adindo berkaitan dengan Grup APRIL dan induknya, Royal Golden Eagle. Indikasi adanya hubungan Adindo dan APRIL yang lebih dekat termasuk tergabungnya perusahaan induk dalam struktur kepemilikan perusahaan Adindo yang pernah berkantor di alamat yang sama dengan kantor pusat RGE di Jakarta dan PT Asian Agri, perusahaan minyak sawit afiliasi RGE yang berbasis di Medan. Indikasi lainnya adalah pihak komisaris, direktur, dan pemegang saham di perusahaan induk tersebut, baik yang masih aktif maupun mantan, yang teridentifikasi sebagai pemegang saham atau karyawan RGE. Di antaranya adalah pendiri dan pimpinan Royal Golden Eagle, Sukanto Tanoto, dan seorang individu lain yang diduga terlibat dalam penyaluran uang ke rekening di luar negeri dalam skandal penghindaran pajak PT Asian Agri.

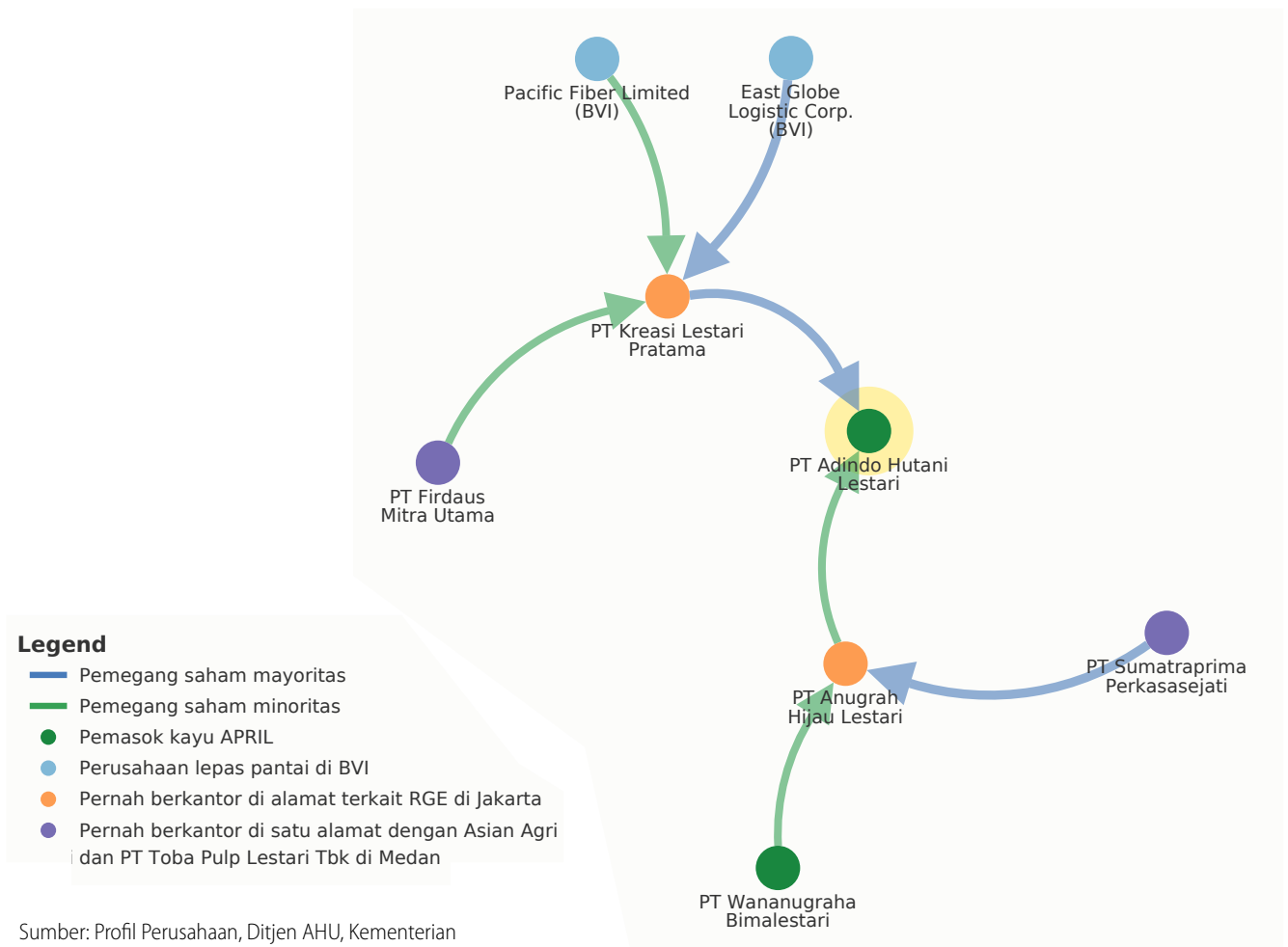
Perusahaan induk dalam struktur kepemilikan Adindo mencakup beberapa perusahaan yang terdaftar di yurisdiksi *offshore*, termasuk British Virgin Islands (BVI), yang tertaut dengan RGE dan ketuanya, Sukanto Tanoto, melalui berbagai dokumen legal yang terekspos dalam Basis Data *Offshore Leaks* ICIJ. Koalisi yang menerbitkan laporan ini mengakui bahwa seringkali ada penggunaan yang sah untuk perusahaan lepas pantai (*offshore companies*). Koalisi ini tidak mengklaim dan tidak bermaksud untuk menyarankan atau menyiratkan bahwa individu, perusahaan, atau entitas lain yang disebutkan dalam laporan ini telah melanggar hukum di Republik Indonesia atau yurisdiksi lain.

Struktur Kepemilikan Korporat Adindo

Menurut profil Adindo, per tanggal 30 Juni 2020, perusahaan ini mempunyai dua pemilik saham langsung.⁴⁵ Pemilik saham mayoritas, yaitu PT Kreasi Lestari Pratama (PT KLP), memiliki 60% saham Adindo, dan PT KLP mempunyai tiga pemegang saham korporat. Dua pemegang saham PT KLP terdaftar di British Virgin Islands (BVI), sedangkan yang ketiga merupakan perusahaan Indonesia (lihat Gambar 8). Pada tahun 2019, Majalah Tempo, menyatakan PT Kreasi Lestari Pratama adalah “anak usaha Grup APRIL milik Sukanto Tanoto.”⁴⁶ Dalam surat yang dikirimkan kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper, yaitu salah satu perusahaan pabrik pulp Grup APRIL, yang menanggapi temuan di laporan ini, Adindo menyatakan bahwa pemegang sahamnya saat ini, yaitu PT Kreasi Lestari Pratama dan PT Anugrah Hijau Lestari “tidak terafiliasi dengan Grup RGE.”⁴⁷ Surat Adindo tersebut disajikan secara lengkap sebagai Lampiran D.

Pemegang saham minoritas Adindo adalah PT Anugrah Hijau Lestari, yang dimiliki oleh dua perusahaan Indonesia. Salah satu perusahaan tersebut, yaitu PT Wananugraha Bumi Lestari memegang izin HTI sendiri untuk kayu pulp dan dinyatakan oleh APRIL sebagai “Mitra Pemasok” untuk pabriknya di Provinsi Riau.⁴⁸

Gambar 8. Struktur kepemilikan PT Adindo Hutani Lestari



Sumber: Profil Perusahaan, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

45 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020. PT Adindo Hutani Lestari. Profil Perusahaan. Diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

46 Adityowati, Putri. 2019. “Hutan Tanoto di Ibu Kota.” Majalah Tempo. 14 September 2019. <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/158412/hutan-tanoto-di-ibu-kota>.

47 Surat Adindo kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper tertanggal 30 September 2020. APRIL menyediakan surat dari PT Adindo Hutani Lestari tersebut kepada koalisi masyarakat sipil yang menerbitkan laporan ini pada tanggal 2 Oktober 2020.

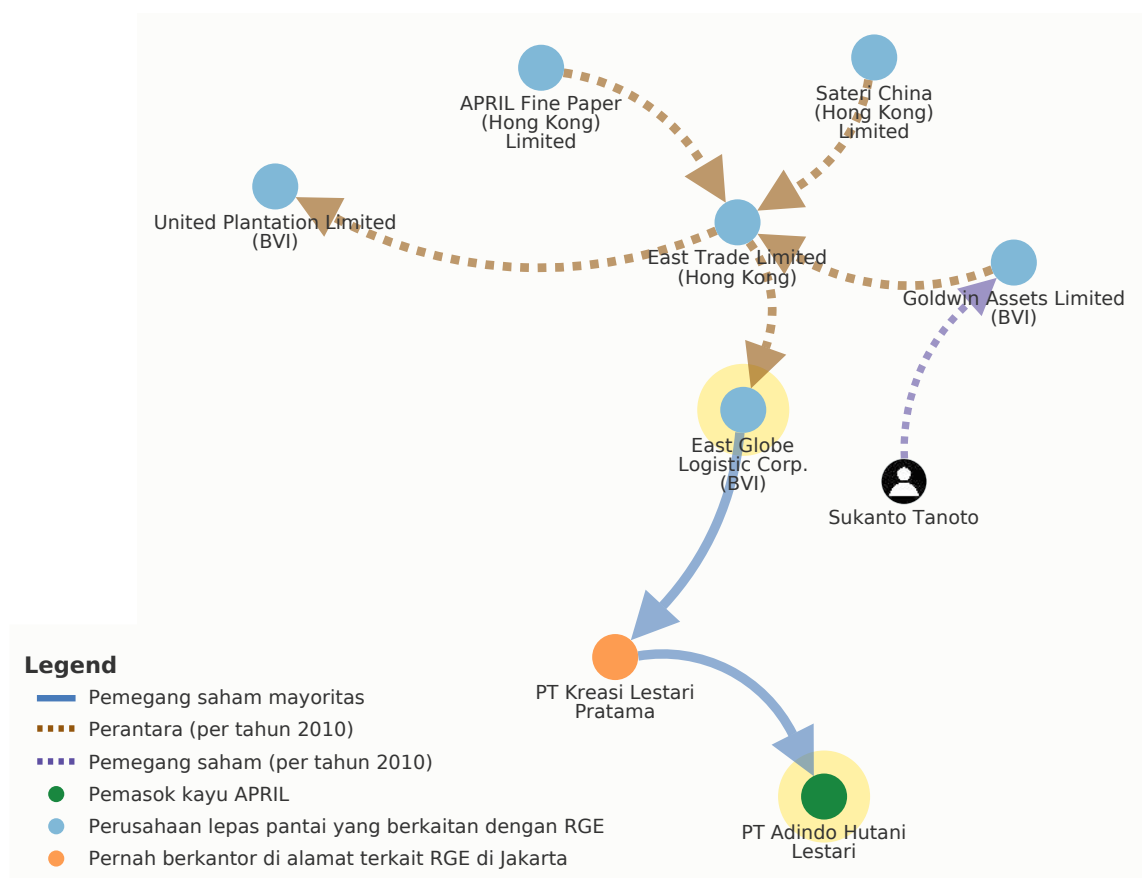
48 APRIL. 2020. Daftar Sumber Pasokan Serat Kayu APRIL per Tanggal 31 Agustus 2020. Dashboard Keberlanjutan APRIL. Diakses pada tanggal September 3, 2020. <http://sustainability.aprilasia.com/en/april-fiber-supply-source/>.

Pemegang saham di luar negeri

EAST GLOBE LOGISTICS CORPORATION, BRITISH VIRGIN ISLANDS

PT Kreasi Lestari Pratama sebagai pemilik saham mayoritas Adindo dikendalikan oleh East Globe Logistics Corporation yang terdaftar di British Virgin Islands (BVI) (lihat Gambar 9).⁴⁹ Berdasarkan Basis Data *Offshore Leaks*, East Globe Logistics Corporation pernah terhubung dengan perusahaan perantara dari East Trade Limited yang terdaftar di Hong Kong.⁵⁰ East Trade Limited terdaftar di laporan keuangan yang diaudit sebagai pihak yang berkaitan dengan salah satu badan hukum RGE, yaitu Sateri Holdings Limited.⁵¹ Laporan keuangan yang sama juga menyatakan Sukanto Tanoto sebagai pemilik manfaat Sateri Holdings Limited.^{52,53}

Gambar 9. Keterkaitan East Globe Logistics Corporation (BVI) dengan PT Adindo Hutani Lestari



Sumber: Profil Perusahaan, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Offshore Leaks ICIJ.

49 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020. Profil Perusahaan PT Kreasi Lestari Pratama. Diakses pada tanggal 30 Juni 2020. Profil perusahaan mengindikasikan bahwa East Globe Logistics Corporation berdomisili di Hong Kong, padahal perusahaan dengan nama tersebut tidak terdaftar di hasil pencarian daftar perusahaan Hong Kong. Pencarian informasi perusahaan di basis data publik dan basis data milik baru menghasilkan satu nama yang cocok, yaitu perusahaan yang terdaftar di BVI.

50 International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 2020. East Globe Logistics Corporation. Basis Data Offshore Leaks. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020. <https://offshoreleaks.icij.org/>. ICIJ memuat penjelasan berikut di situs webnya: "Basis data ini memuat informasi tentang lebih dari 785.000 badan hukum lepas pantai yang menjadi bagian dari investigasi *Paradise Papers*, *Panama Papers*, *Offshore Leaks* dan *Bahamas Leaks*. Data tersebut berkaitan dengan orang individu dan perusahaan di lebih dari 200 negara dan teritori."

51 Sateri Holdings Limited. 2010. Penawaran Global Sateri Holdings Limited. Prospektus perusahaan. Hong Kong. 26 November 2010. <http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2010/1126/lt20101126025.pdf>.

52 Sateri Holdings Limited. 2010. *Op. cit.*

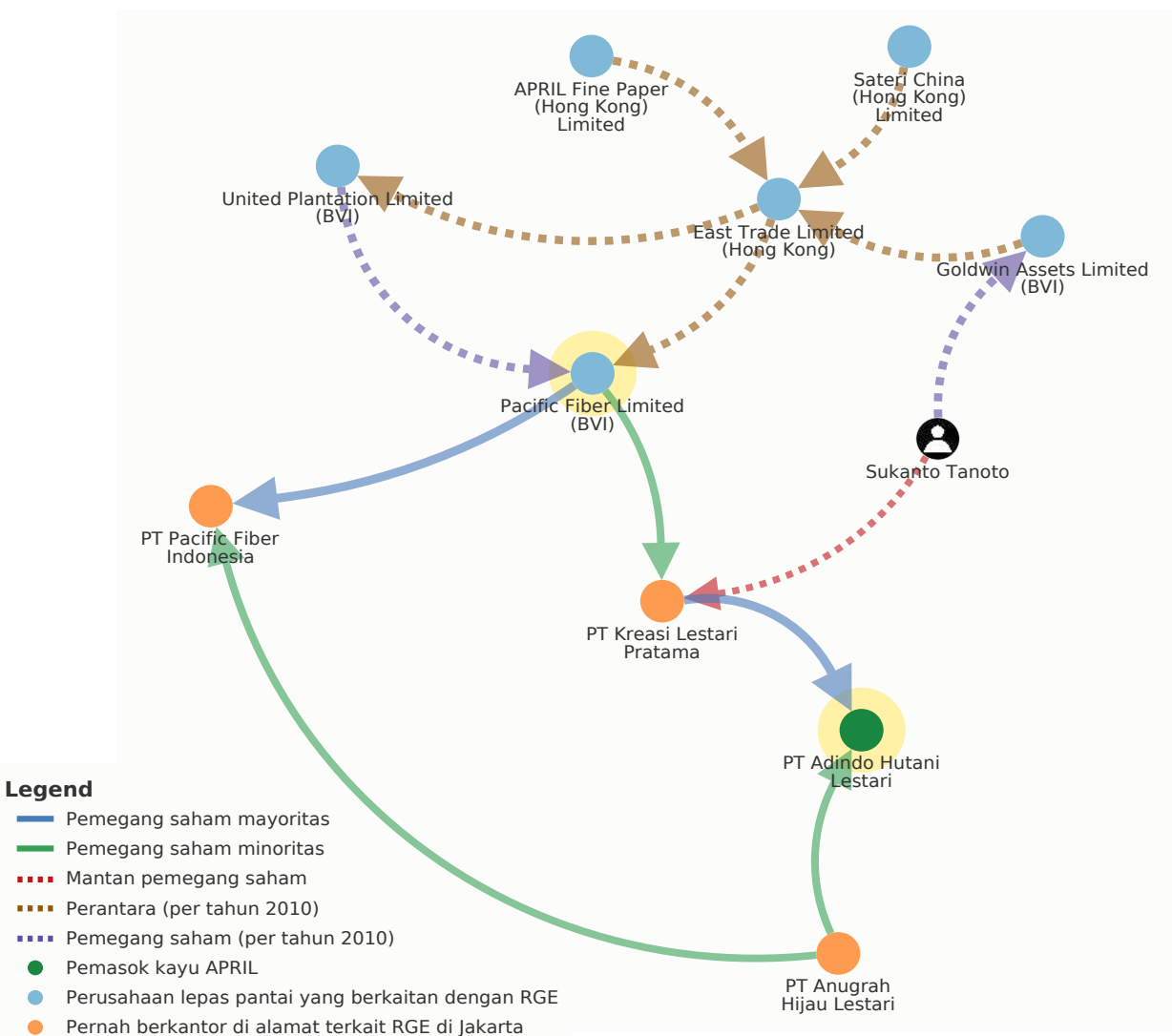
53 Peraturan Presiden No. 13/2018 mendefinisikan "pemilik manfaat" sebagai "orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini."

Basis Data Offshore Leaks juga mengindikasikan bahwa East Trade Limited merupakan perantara bagi 52 badan hukum lain per tahun 2010, sebagian di antaranya berkaitan dengan Grup APRIL dan/atau Royal Golden Eagle (lihat Lampiran C). Di antara badan hukum tersebut, ada yang berkaitan dengan Grup APRIL, seperti APRIL Fine Paper (Hong Kong) Limited, dan perusahaan lain yang berkaitan dengan Grup Sateri, seperti Sateri Fujian (Hong Kong) Limited.⁵⁴ Selain hubungan korporat ini, pendiri RGE, Sukanto Tanoto dan isterinya, Tinah Bingei terdaftar sebagai pemegang saham dan direktur Goldwin Assets Limited, yang berdasarkan Basis Data Offshore Leaks menjadi perantara East Trade Limited per tahun 2010.

PACIFIC FIBER LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLANDS

Pemegang saham terbesar kedua PT Kreasi Lestari Pratama adalah Pacific Fiber Limited, yaitu perusahaan induk yang terdaftar di BVI dan juga pernah menjadi perantara East Trade Limited (lihat Gambar 10).⁵⁵ Basis Data Offshore Leaks mengindikasikan bahwa per tahun 2010, pemegang saham Pacific Fiber Limited adalah United Plantations Limited. Sama seperti East Globe Logistics Corporation, United Plantations Limited juga berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang telah disebut di atas, yang berkaitan dengan Grup APRIL dan/atau Royal Golden Eagle.

Gambar 10. Keterkaitan Pacific Fiber Limited (BVI) dengan PT Adindo Hutani Lestari



Sumber: Profil Perusahaan, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Offshore Leaks ICJ.

54 International Consortium of Investigative Journalists. 2020. East Trade Limited. Basis Data Offshore Leaks. Diakses pada tanggal 22 Januari 2020. <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/290577>.

55 International Consortium of Investigative Journalists. 2020. Pacific Fiber Limited. Basis Data Offshore Leaks. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020.

Pacific Fiber Limited adalah pemegang saham mayoritas di PT Pacific Fiber Indonesia, yang terdaftar di Indonesia. PT Pacific Fiber Indonesia juga terdaftar di Jakarta dengan alamat yang terkait dengan RGE dan yang pernah sama dengan kedua pemegang saham langsung Adindo, yaitu PT Kreasi Lestari Utama dan PT Anugrah Hijau Lestari (lihat bagian di bawah ini yang membahas lokasi kantor). Menariknya, laporan yang diterbitkan oleh peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) pada 2006 menyatakan bahwa, “menurut pejabat APRIL yang diwawancarai untuk kajian Pacific Fiber, sebuah perusahaan dengan struktur kepemilikan yang sangat mirip dengan struktur kepemilikan APRIL, membeli hutan tanaman PT ITCI dan Adindo [Hutani Lestari] di Provinsi Kalimantan Timur pada awal sampai pertengahan tahun 2005.”⁵⁶ Konon PT ITCI Hutani Manunggal saat ini nampaknya dimiliki pemilik manfaat Grup APRIL, Sukanto Tanoto, melalui Equerry Company Ltd., yaitu badan usaha yang terdaftar di Seychelles.⁵⁷

Individu yang terkait dengan Royal Golden Eagle

SUKANTO TANOTO DAN TINAH BINGEI

Mulai tahun 1997, saham mayoritas langsung di Adindo dan PT Kreasi Lestari Pratama pernah dimiliki oleh Sukanto Tanoto (lihat Gambar 11), pimpinan dan pendiri Royal Golden Eagle dan APRIL, bersama isterinya, Tinah Bingei (lihat Gambar 12).⁵⁸ Tanoto juga pernah menjadi pemegang saham di dua perusahaan induk lain di struktur kepemilikan Adindo, sedangkan Tinah Bingei juga pernah menjadi pemegang saham di salah satu perusahaan induk tersebut.⁵⁹ Berdasarkan *Offshore Leaks*, Tanoto pernah menjadi pemegang saham di Goldwin Assets Limited, yang pernah merupakan perantara East Trade Limited per tahun 2010.



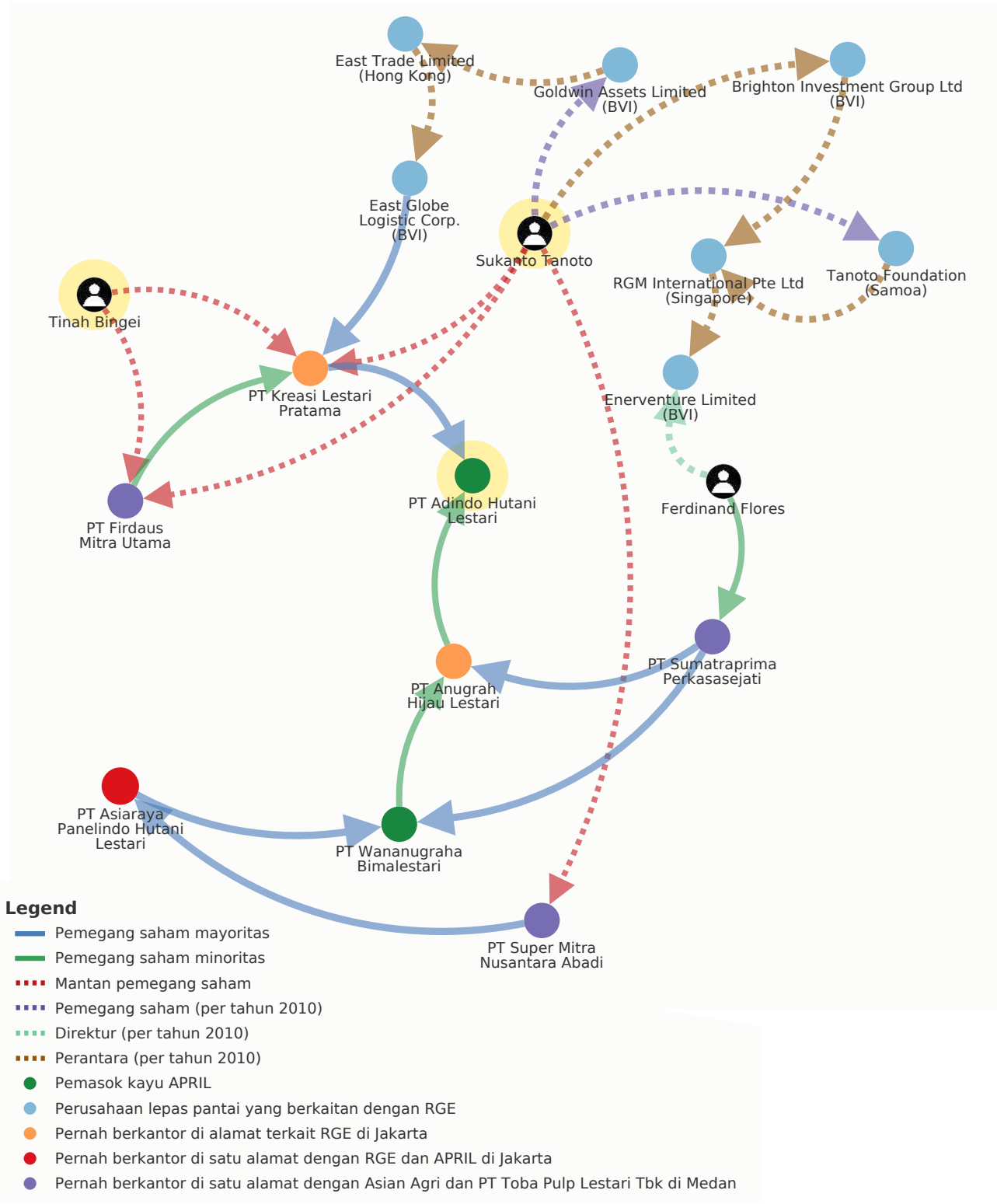
Gambar 11. Sukanto Tanoto, Pendiri dan Ketua Royal Golden Eagle

Sumber: Tanoto Foundation Annual Report 2015.

-
- 56 Pirard, Romain dan Cossalter, Christian. 2006. *The Revival of Industrial Forest Plantations in Indonesia's Kalimantan Provinces*. Center for International Forestry Research. Kertas Kerja No. 37. Bogor, Indonesia. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/research/governance/foresttrade/Attachment47-The_Revival_of_Industrial_Forest_Lowres.pdf.
- 57 Menurut laporan dalam Majalah Tempo, Sukanto Tanoto mengambil kendali atas PT ITCI Hutani Manunggal antara tahun 2004 dan 2006 dengan membeli 90% saham di perusahaan tersebut melalui PT Kreasi Lestari Pratama, yang disebutkan oleh Majalah Tempo sebagai “anak usaha Grup APRIL milik Sukanto Tanoto.” Menurut Majalah Tempo, Komisaris Utama PT ITCI Hutani Manunggal, Sri Widodo, mengatakan, “Equerry adalah perusahaan pembiayaan yang juga terafiliasi dengan Grup APRIL.” Lihat Adityowati, Putri. 2019. “Hutan Tanoto di Ibu Kota.” Majalah Tempo. 14 September 2019. <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/158412/hutan-tanoto-di-ibu-kota>.
- 58 PT Kreasi Lestari Pratama menjadi pemegang saham Adindo pada tahun 2010 setelah kepemilikan Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei atas PT Kreasi Lestari Pratama dialihkan ke pihak lain.
- 59 Saham Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei di PT Firdaus Mitra Utama dan saham Sukanto Tanoto di PT Super Mitra Nusantara Abadi dialihkan kepada pihak lain sebelum perusahaan tersebut secara tidak langsung mengendalikan saham Adindo.

Situs web APRIL menyatakan bahwa "Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL), merupakan anggota Grup RGE yang didirikan oleh Sukanto Tanoto pada tahun 1973. Di bawah kepemimpinannya, RGE telah tumbuh menjadi grup berskala global yang mempekerjakan lebih dari 60.000 orang, memiliki total aset lebih dari US\$ 20 miliar, dan penjualan yang menjangkau seantero dunia."⁶⁰

Gambar 12. Keterkaitan Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei dengan PT Adindo Hutani Lestari



Sumber: Profil Perusahaan, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Indonesia. Offshore Leaks ICIJ.

60 APRIL. 2020. "Sukanto Tanoto." Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2020. <https://www.aprilasia.com/en/sukanto-tanoto>.

PROTASIOUS DARITAN

Pemegang saham minoritas PT Adindo Hutani Lestari, yaitu PT Anugrah Hijau Lestari, dikendalikan secara tidak langsung (melalui PT Wananugraha Bima Lestari) oleh perusahaan induk bernama PT Asiaraya Panelindo Hutani Lestari. Direktur PT Asiaraya Panelindo Hutani Lestari saat ini adalah Protasius Daritan (lihat Gambar 14) yang disebut dalam Laporan Tahunan Tanoto Foundation tahun 2015 sebagai, "salah satu pemimpin senior di RGE Indonesia" (lihat Gambar 13).⁶¹ Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa "Protasius Daritan berperan penting dalam memimpin tahap awal program pengembangan masyarakat RGE. Ia mendukung kerjasama antara Tanoto Foundation dan perusahaan-perusahaan RGE untuk meningkatkan dampak bagi masyarakat."⁶² Protasius Daritan adalah mantan Direktur atau Komisaris dua perusahaan lain di struktur kepemilikan Adindo, dan mantan Komisaris di PT Pacific Fiber Indonesia (lihat di atas). Berdasarkan Basis Data Offshore Leaks, Protasius Daritan pernah berkaitan dengan perusahaan *offshore* RGE yang lain dan Sukanto Tanoto.

Gambar 13. Dewan Pengurus Tanoto Foundation dari Laporan Tahunan Tanoto Foundation 2015

THE FOUNDATION'S LEADERSHIP:
THE BOARD OF GOVERNANCE

Bey Soo Khiang
Chairperson, Board of Governance

Bey Soo Khiang, Vice Chairman of RGE, holds a Masters in Arts (Engineering) from University of Cambridge and a Masters in Public Administration from Kennedy School of Government, Harvard University. At Tanoto Foundation, he provides guidance in improving access to early childhood education and primary education.

Irsan Syarief
Member

Irsan Syarief, President of RGE Indonesia, graduated from Universitas Darma Agung, Medan, majoring in Economics. As a Board member of Tanoto Foundation, Irsan oversees alignment of the Foundation's programs with government priorities.

Protasius Daritan
Member

Protasius Daritan is one of the senior leaders of RGE Indonesia. Protasius Daritan was instrumental in leading the early stage of RGE's community development programs. He advocates collaboration between Tanoto Foundation and RGE companies to leverage impact for the community.

Ibrahim Hasan
Member

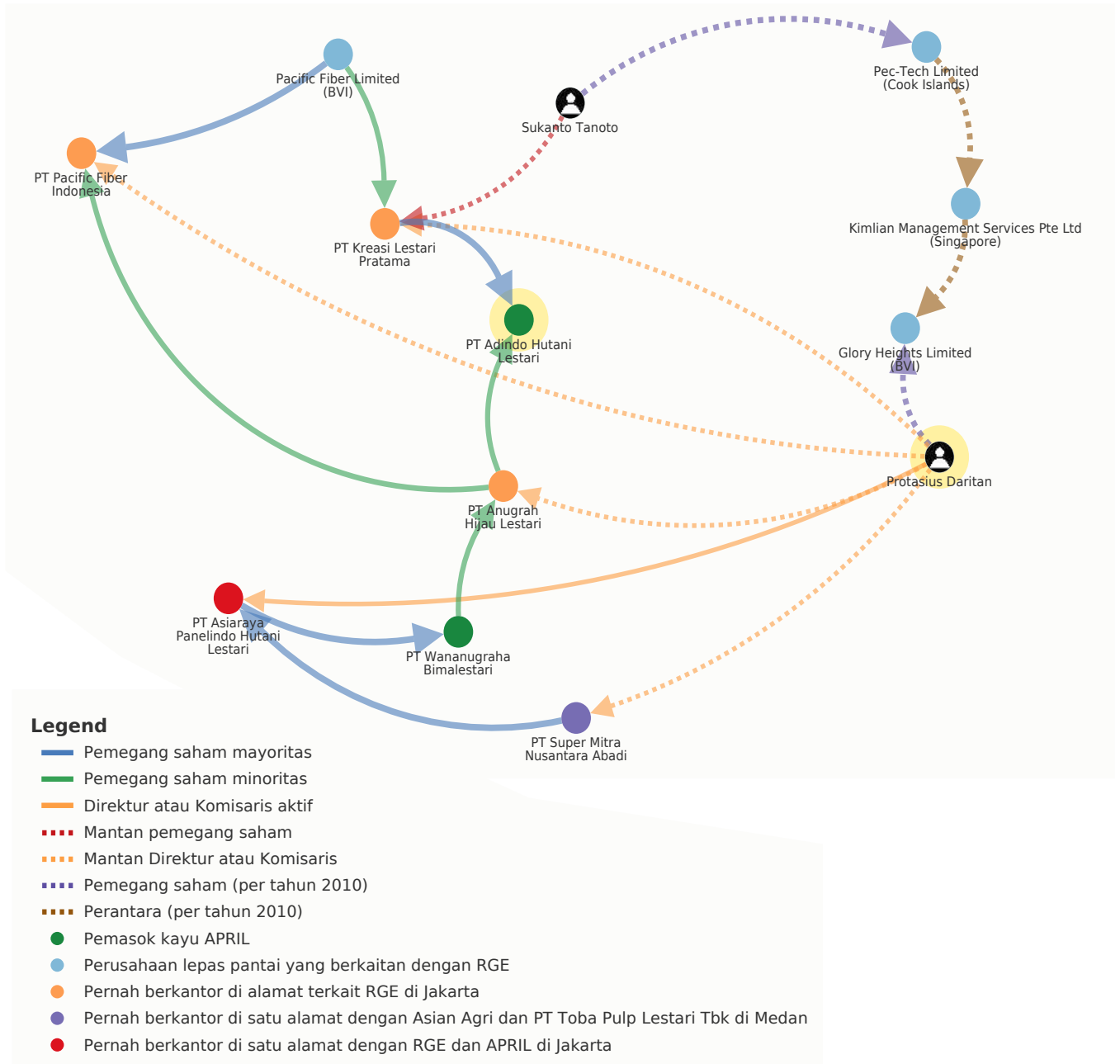
Ibrahim Hasan, President Commissioner of PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), a subsidiary of APRIL, holds a Bachelor of Science degree in Electrical Engineering from MIT, and a Ph.D in Economics from the University of California at Berkeley. As Board member of Tanoto Foundation Ibrahim provides guidance in strategic partnership and impact measurement.

Sumber: Tanoto Foundation. 2016. *Laporan Tahunan 2015*. <http://www.tanotofoundation.org/wp-content/uploads/2016/08/TF-Annual-Report-Web-Chp-2.pdf>.

61 Tanoto Foundation. 2016. *Laporan Tahunan 2015*. Jakarta, Indonesia. <http://www.tanotofoundation.org/wp-content/uploads/2016/08/TF-Annual-Report-Web-Chp-2.pdf>.

62 Tanoto Foundation. 2016. *Op. cit.*

Gambar 14. Keterkaitan Protasius Daritan dengan PT Adindo Hutani Lestari



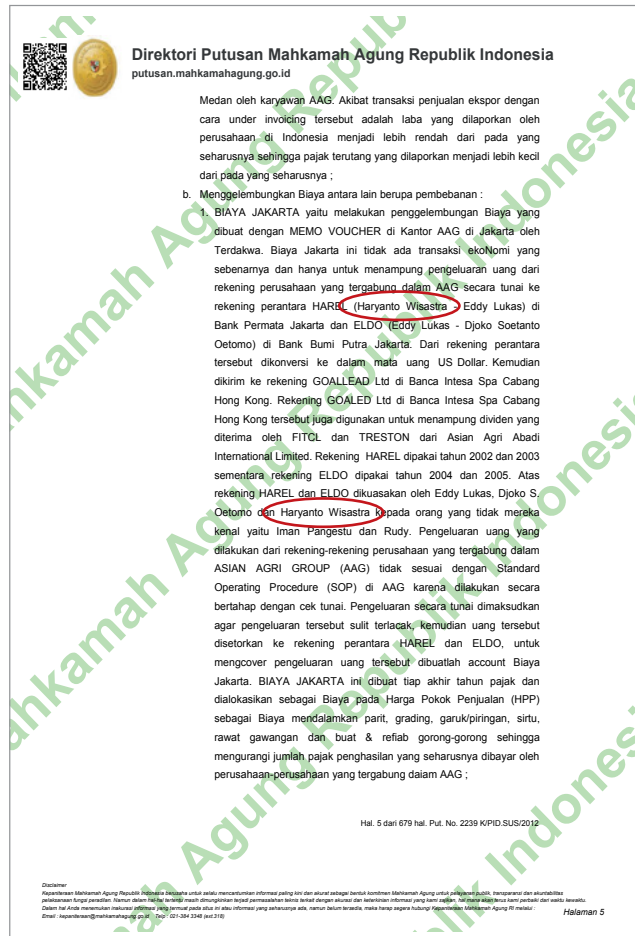
Sumber: Profil Perusahaan, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Offshore Leaks ICIJ.

HARYANTO WISASTRA

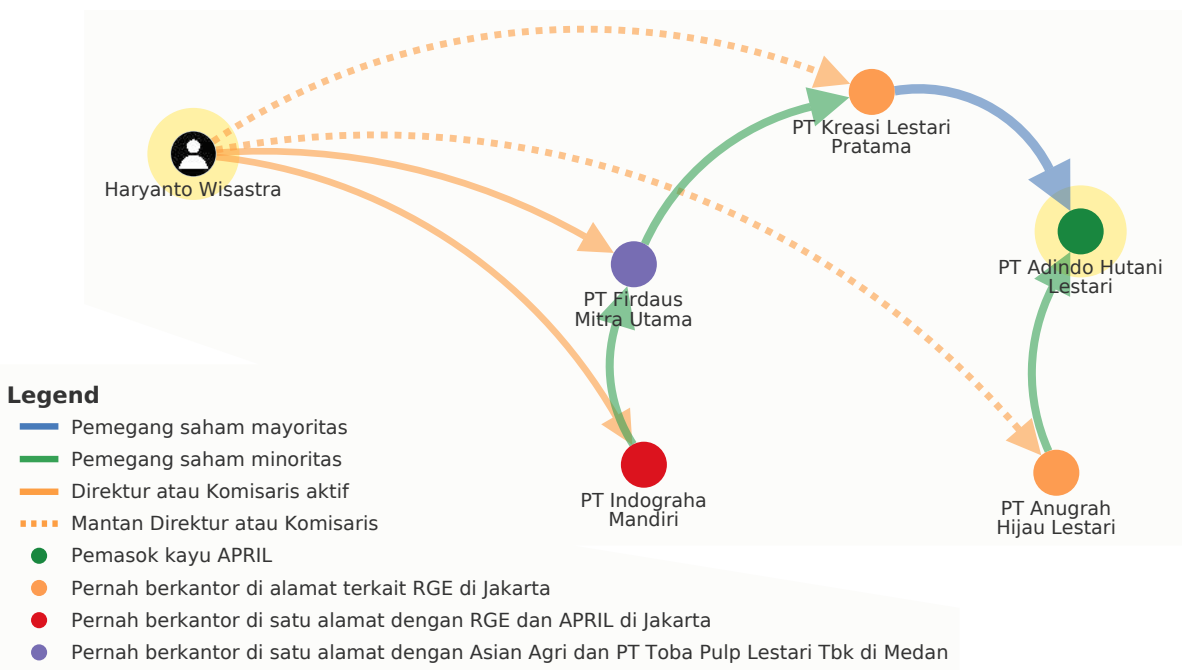
Haryanto Wisastra pernah menjadi Komisaris di PT Kreasi Lestari Pratama, yaitu pemegang saham mayoritas langsung di Adindo, dan PT Anugrah Hijau Lestari, yaitu pemegang saham minoritas Adindo (lihat Gambar 16). Saat ini dia masih aktif sebagai Komisaris di dua perusahaan lain di dalam struktur kepemilikan Adindo, yakni PT Firdaus Mitra Utama dan PT Indograha Mandiri. Haryanto Wisastra terlibat dalam kasus penghindaran pajak PT Asian Agri, yaitu perusahaan kelapa sawit di Grup RGE yang didenda Rp 2,5 triliun (sekitar US\$ 205 juta) pada tahun 2012 karena melakukan pengelabuan skema penentuan harga transfer untuk menghindari kewajiban pajak selama tahun 2002–2005 (lihat Gambar 15). Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, dinyatakan salah satu rekening atas nama Haryanto Wisastra digunakan dalam skema penentuan harga transfer PT Asian Agri.⁶³

Gambar 15. Petikan dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada sidang manajer perpajakan PT Asian Agri

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012.



Gambar 16. Keterkaitan Haryanto Wisastra dengan PT Adindo Hutani Lestari



Sumber: Profil Perusahaan, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Offshore Leaks ICJ.

63 Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2012. Putusan No. 2239 K/PID.SUS/2012. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2dec38361ab4193b649785cf9c668f52.html>.

DEDY SUTANTO

Dedy Sutanto adalah pemegang saham mayoritas di PT Asiaraya Panelindo Hutani Lestari, melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung, sehingga memegang kendali tidak langsung atas 4% saham di Adindo (lihat Gambar 18). Dedy Sutanto pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Toba Pulp Lestari dari bulan Februari 2008 sampai dengan Oktober 2009 (lihat Gambar 17).^{64,65} PT Toba Pulp Lestari memiliki pabrik pulp dan beberapa izin konsesi hutan tanaman industri di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan laporan keuangan dari perusahaan RGE lainnya, pemegang saham kendali PT Toba Pulp Lestari adalah Sukanto Tanoto dan anggota keluarga Tanoto.⁶⁶

Gambar 17. Petikan dari Laporan Tahunan 2009 PT Toba Pulp Lestari Tbk.

PT TOBA PULP LESTARI Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
(Dalam Ribuan Dollar Amerika, kecuali Data Saham)

1. U M U M (Lanjutan)

b. Karyawan, Direksi dan Komisaris

Susunan Pengurus Perusahaan pada 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	<u>2 0 0 9</u>	<u>2 0 0 8</u>
Komisaris Utama	: Roli Arifin	: Dedy Sutanto, S.H., M.Hum
Komisaris	: Drs. Sabam Leo Batubara	: Drs. Sabam Leo Batubara
Komisaris Independen	: Lundu Panjaitan, S.H, M.A Lennardi Anggijono	: Lundu Panjaitan, S.H, M.A Ir. Willihar Tamba Lennardi Anggijono
Direktur Utama	: Subhash Chander Paruthi	: Roli Arifin
Direktur	: Juanda Panjaitan, S.E Ir. Firman Purba Wilim Anwar Lawden, S.H	: Mulia Nauli Juanda Panjaitan, S.E Ir. Firman Purba Wilim

Paket imbalan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 berupa gaji masing-masing sebesar US\$ 439 dan US\$ 504. Tidak ada imbalan berupa tunjangan dana pensiun dan atau manfaat khusus lainnya yang diberikan selama tahun 2009 dan 2008.

Jumlah karyawan tetap Perusahaan rata-rata 925 dan 970 karyawan masing-masing untuk tahun 2009 dan 2008.

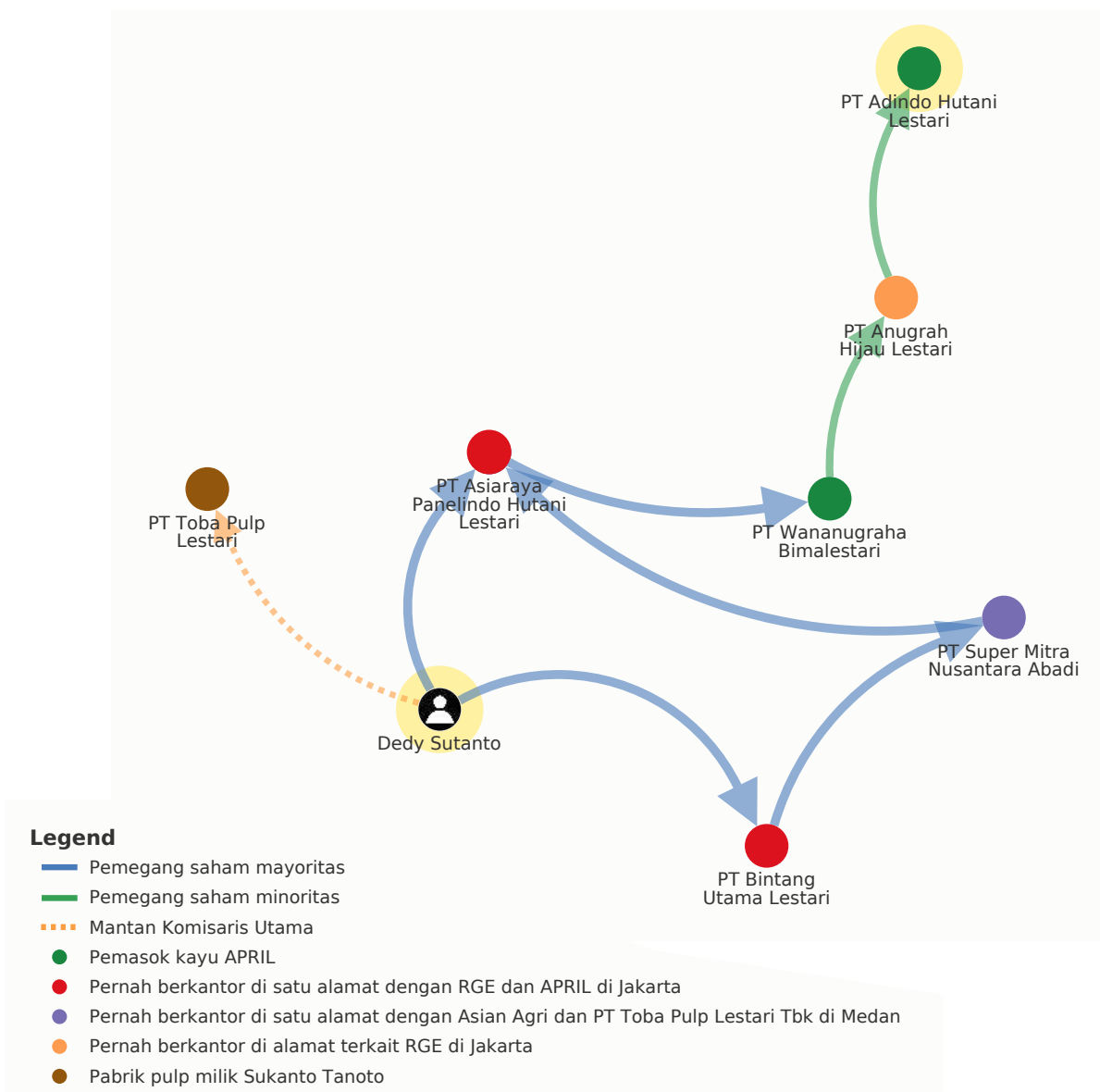
Sumber: PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2010.

64 PT Toba Pulp Lestari Tbk. 2010. *Laporan Tahunan 2009*. Medan, Indonesia.

65 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020. PT Toba Pulp Lestari Tbk. Profil Perusahaan. Diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

66 Sateri Holdings Limited. 2010. *Op. cit.*

Gambar 18. Keterkaitan Dedy Sutanto dengan PT Adindo Hutani Lestari



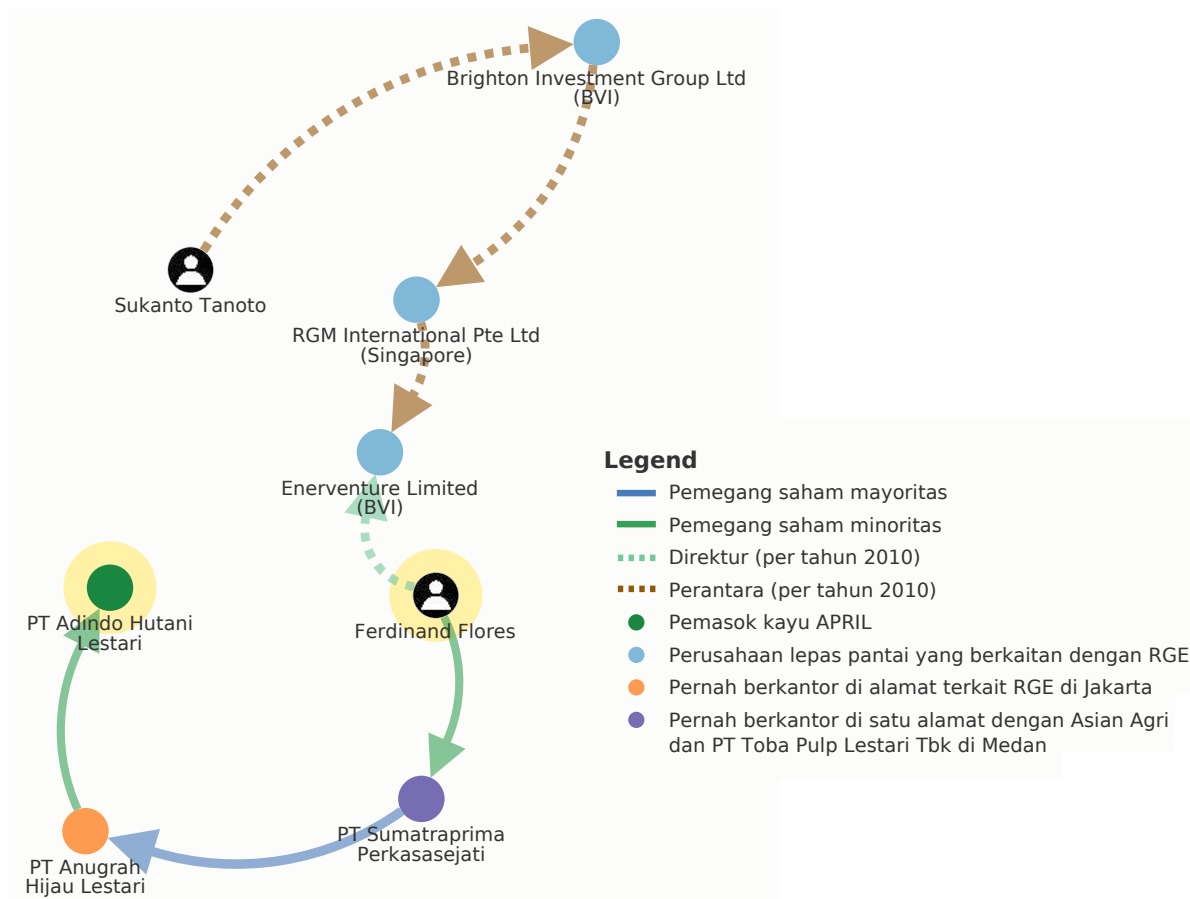
Sumber: Profil Perusahaan, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Offshore Leaks ICIJ.

FERDINAND FLORES

Sebagian saham PT Anugrah Hijau Lestari dimiliki oleh perusahaan induk bernama PT Sumatraprima Perkasasejati. Ferdinand Flores adalah pemegang saham minoritas PT Sumatraprima Perkasasejati, sehingga memegang kendali tidak langsung atas 6% saham Adindo (lihat Gambar 19). Berdasarkan Basis Data *Offshore Leaks*, Flores pernah terdaftar sebagai Direktur Enerventure Limited, yaitu perusahaan induk yang terdaftar di British Virgin Islands. Menurut laporan, Enerventure Limited merupakan perantara RGM International Pte Ltd., yaitu perusahaan RGE yang terdaftar di Singapura dan sekarang bernama RGE Pte. Ltd.⁶⁷

Saat ini, salah satu Direktur RGE Pte. Ltd. adalah Lee Chong, yang juga menjabat sebagai salah satu Direktur Peregrine Holdings Limited, yaitu pemegang saham tunggal di RGE Pte. Ltd. yang terdaftar di Bermuda.⁶⁸ Menurut profilnya di LinkedIn, Chong bekerja di RGE sejak tahun 2003, dan saat ini menjadi 'Business Controller' di grup tersebut. Sebelumnya, dia bekerja di RGE sebagai Manajer Umum Humas, dan sebelum itu sebagai Manager Senior di tim Perencanaan Strategis dan Keuangan Korporat RGE.⁶⁹ Direktur lain di RGE Pte. Ltd. di Singapura dan Peregrine Holdings Limited di Bermuda adalah Suwandi Lim. Menurut profilnya di LinkedIn, Lim sudah bekerja di RGE Pte. Ltd. selama 15 tahun. Pada awalnya sebagai Manajer Humas Korporat, saat ini dia menjabat sebagai Kepala Humas.⁷⁰

Gambar 19. Keterkaitan Ferdinand Flores dengan PT Adindo Hutani Lestari



Sumber: Profil Perusahaan, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Offshore Leaks ICIJ.

67 Accounting and Corporate Regulatory Authority. 2020. RGE Pte. Ltd. Profil Perusahaan. Pemerintah Singapura. Diakses pada tanggal 15 September 2020.

68 Pemerintah Bermuda. 2020. Peregrine Holdings Limited. Daftar Direksi. Diakses pada tanggal 17 September 2020. <https://www.gov.bm/directors-register>.

69 LinkedIn. 2020. Profil Lee Chong. Diakses pada tanggal 15 September 2020. <https://www.linkedin.com/in/lee-chong-2208041b/>.

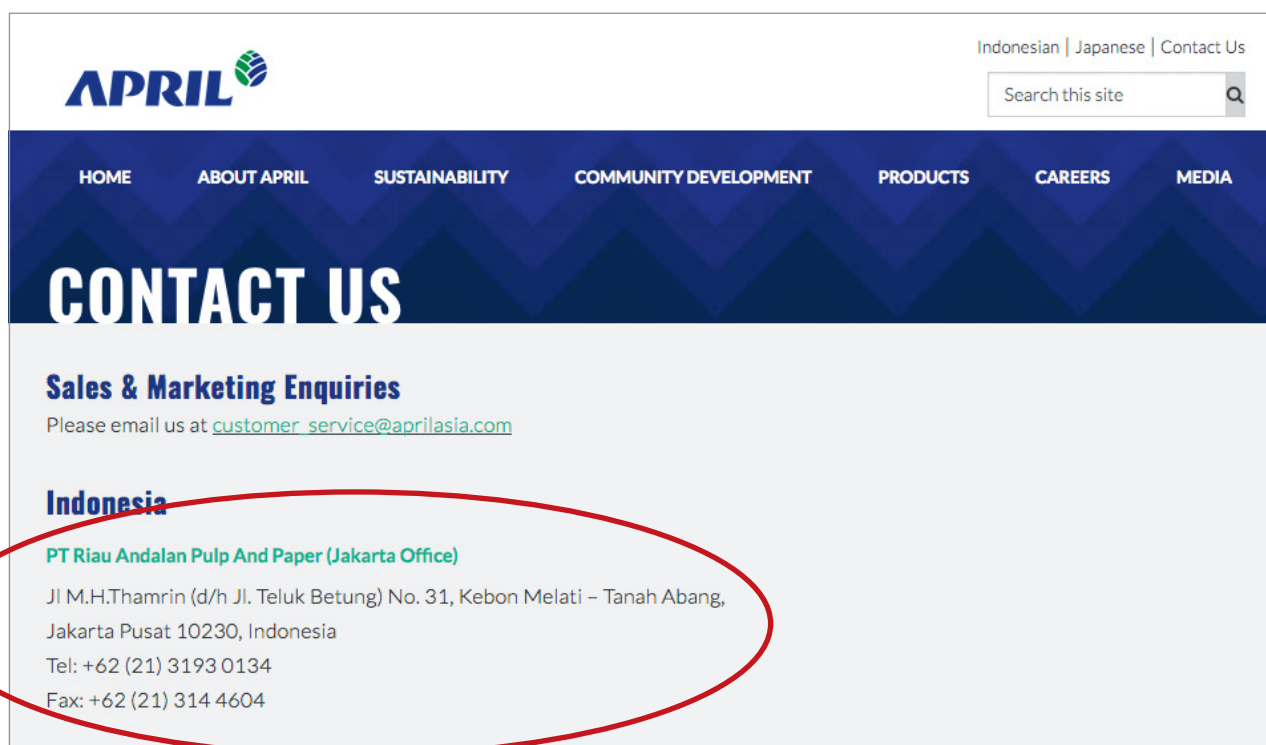
70 LinkedIn. 2020. Profil Lim Suwandi. Diakses pada tanggal 17 September 2020. <https://sg.linkedin.com/in/suwandi-lim-4997691b>.

Alamat yang Terkait dengan Royal Golden Eagle⁷¹

JALAN TELUK BETUNG NO. 31

Tiga perusahaan di struktur korporat Adindo, pernah, menyatakan kantornya berada di satu alamat dengan kantor pusat Grup APRIL yaitu di Jalan Teluk Betung No. 31 (lihat Gambar 20) dekat Bundaran Hotel Indonesia di Jakarta Pusat (lihat Gambar 21). Alamat tersebut juga menjadi domisili kantor pusat PT Riau Andalan Pulp & Paper⁷² yang mengoperasikan pabrik pulp APRIL di Provinsi Riau (lihat Gambar 22), dan kantor pusat Royal Golden Eagle di Jakarta.⁷³ Hal ini sangat penting karena pesaing APRIL, yaitu Asia Pulp & Paper, pernah terungkap melakukan praktik serupa dalam investigasi oleh Associated Press pada 2018, yaitu pemegang saham perusahaan pemasok yang konon bersifat independen terdaftar di alamat kantor pusatnya di Jakarta.^{74,75}

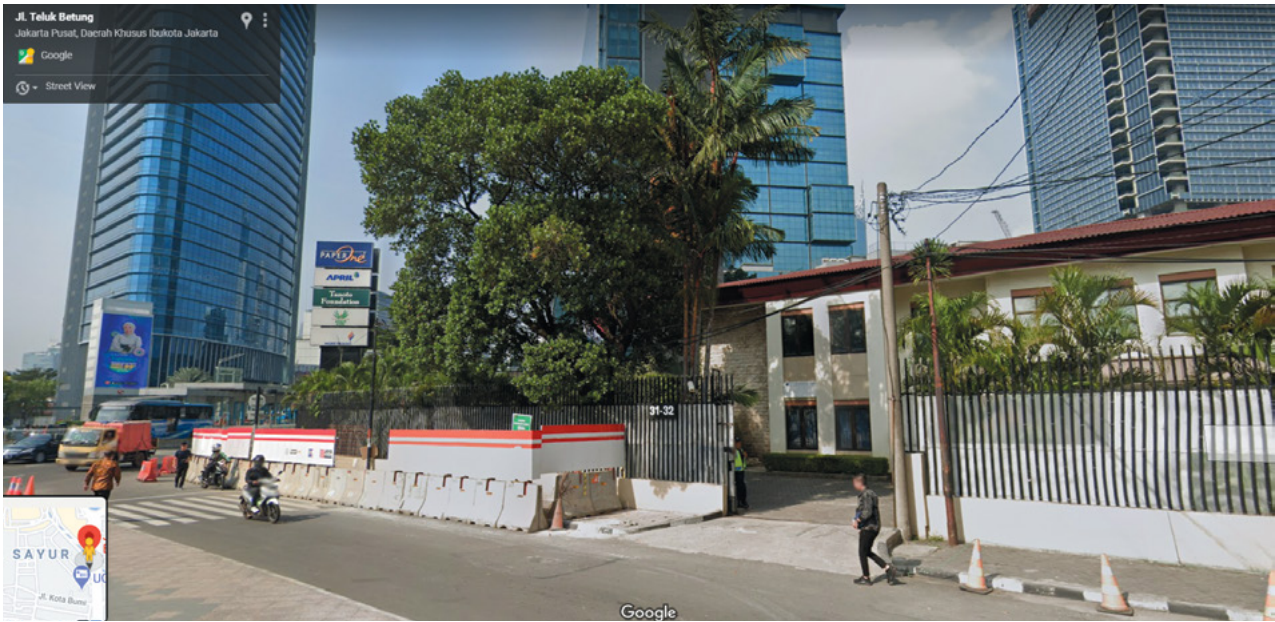
Gambar 20. Situs web Grup APRIL dengan alamat PT Riau Andalan Pulp & Paper



Sumber. APRIL. 2020.

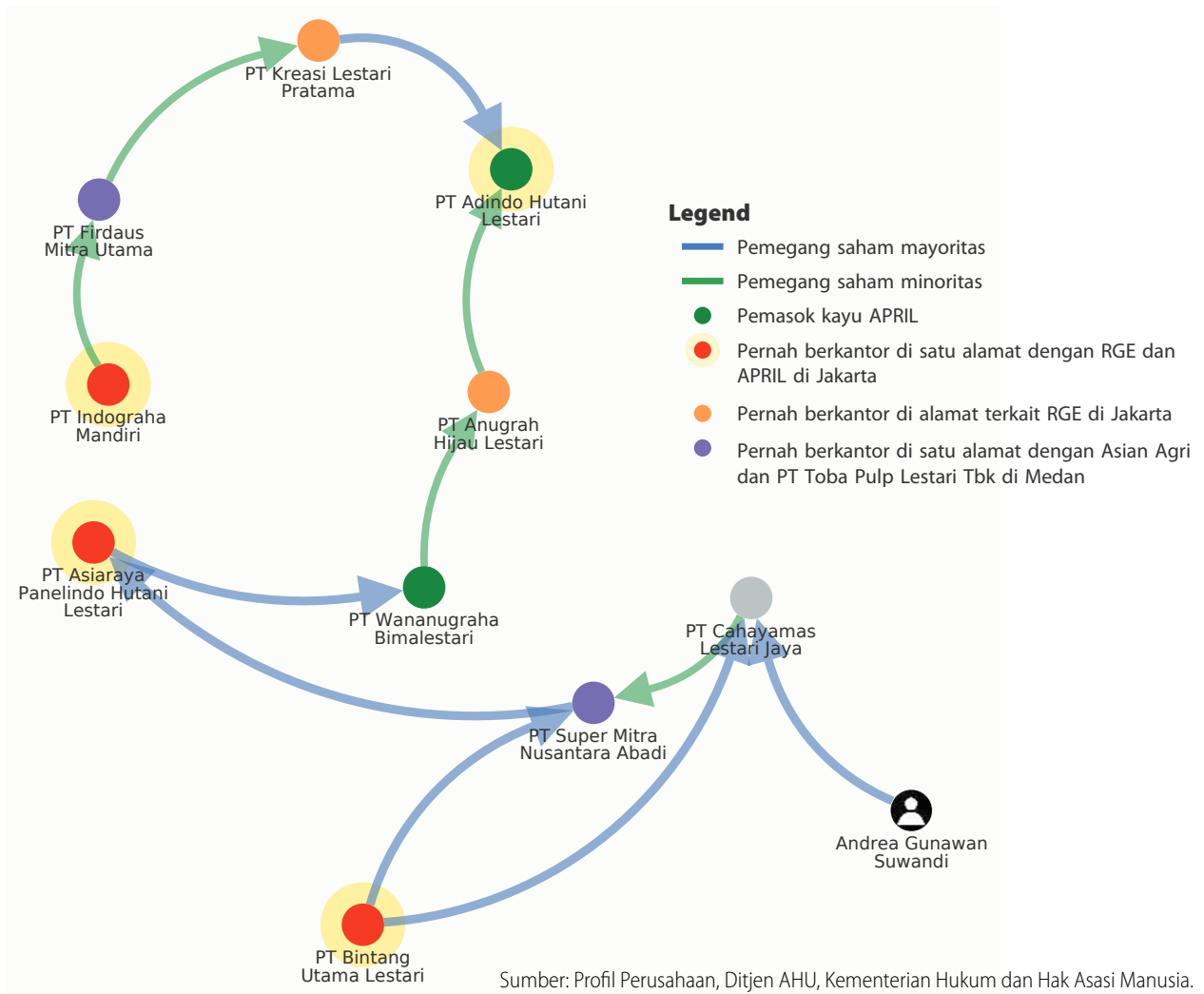
- 71 Diakui bahwa secara teoritis perusahaan yang tidak berkaitan dengan APRIL dan Royal Golden Eagle Grup dapat menyewa ruang kantor di lokasi ini. Namun, kesamaan alamat terdaftar di perusahaan yang dianalisa dan tempat yang diketahui sebagai lokasi APRIL dan Royal Golden Eagle menjadi indikator penting akan potensi keterkaitan dengan grup tersebut. Bila dilihat secara bersamaan dengan keterkaitan yang tampak antara pemegang saham, komisaris, dan/atau direksi yang ada di luar negeri dan di Indonesia, maka kesamaan alamat terdaftar menambah kemungkinan bahwa keterkaitannya memang ada.
- 72 APRIL. 2020. "Contact Us." Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020. <https://www.aprilasia.com/en/contact-us>.
- 73 Royal Golden Eagle. 2020. "Contact Us." RGE Pte Ltd. <https://www.rgei.com/about/contact>.
- 74 Wright, Stephen. 2017a. Raksasa Pulp Dikaitkan dengan Perusahaan yang Dituduh Membakar. *Associated Press*, 20 Desember. <https://www.apnews.com/fd4280b11595441f81515daef0a951c3>.
- 75 Koalisi Anti Mafia Hutan dkk. 2018. *Tapi Buka Dulu Topengmu: Analisis Struktur Kepemilikan dan Kepengurusan Perusahaan Pemasok Kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia*. 30 Mei 2018. Jakarta. <https://auriga.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Removing-the-corporate-mask.pdf>.

Gambar 21. Gedung di Jl. Teluk Betung No. 31, yang menjadi kantor pusat RGE, Grup APRIL, dan PT Riau Andalan Pulp & Paper di Jakarta



Sumber: Google Street View. 2020.

Gambar 22. Perusahaan perantara di struktur kepemilikan Adindo yang pernah berkantor di kantor pusat RGE, Grup APRIL, dan PT Riau Andalan Pulp & Paper di Jakarta



JALAN TELUK BETUNG NO. 36

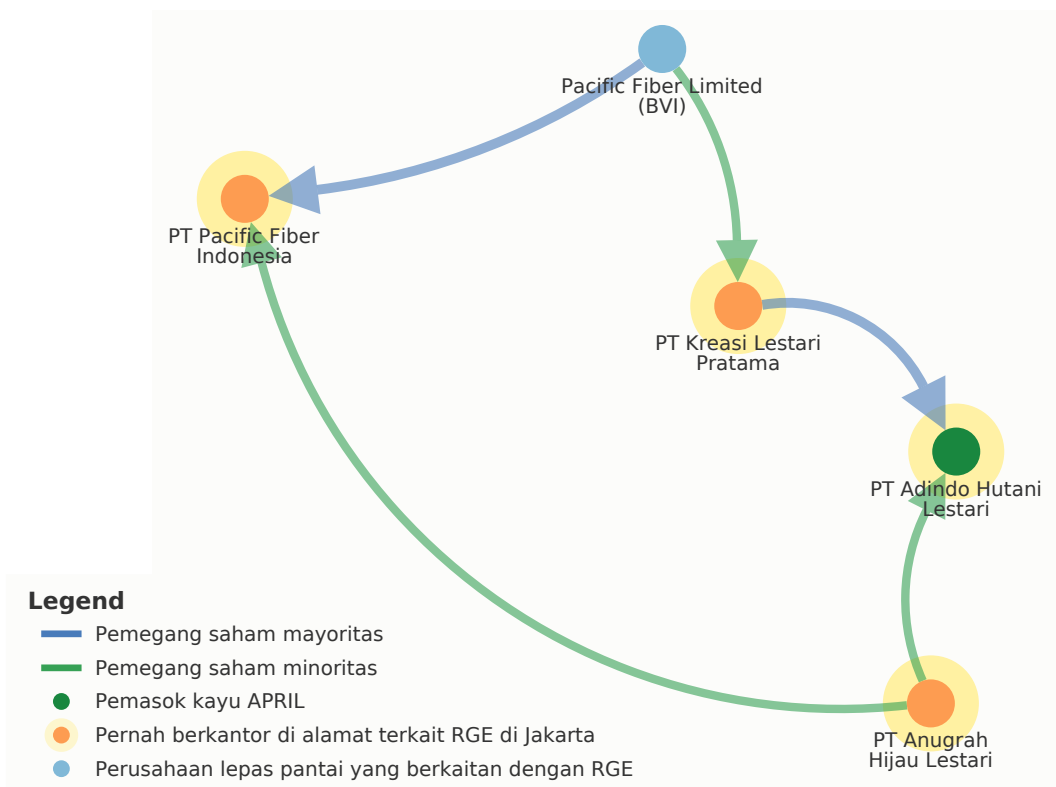
Jalan Teluk Betung No. 36 di Jakarta Pusat, sampai tahun 2018, merupakan alamat kantor dua perusahaan pemegang saham langsung Adindo (lihat Gambar 24). Lokasi gedung ini tidak jauh dari Jl Teluk Betung No. 31 yang merupakan kantor pusat Grup Royal Golden Eagle dan Grup APRIL (lihat Gambar 23). Beberapa perusahaan yang diketahui sebagai afiliasi RGE, APRIL, dan/atau pemilik manfaat grup tersebut berkantor atau pernah berkantor di alamat yang sama. Beberapa perusahaan tersebut menyatakan alamat kantornya di Jalan Teluk Betung No. 31-36, sehingga mengisyaratkan adanya keterkaitan antara kedua alamat tersebut.

Gambar 23. Gedung kantor terkait RGE di Jl. Teluk Betung No. 36



Sumber: Auriga. 2020.

Gambar 24. Perusahaan induk di struktur kepemilikan Adindo yang pernah berkantor di Jl. Teluk Betung No. 36, alamat yang terkait RGE di Jakarta



Sumber: Profil Perusahaan, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

LETJEN HARYONO MT A-1 DI MEDAN

Beberapa perusahaan di struktur kepemilikan Adindo pernah berkantor alamat kantor di Medan, Provinsi Sumatera Utara, di gedung yang sama dengan kantor PT Asian Agri (lihat Gambar 23), yaitu perusahaan produsen minyak kelapa sawit di Grup RGE dan PT Toba Pulp Lestari, yaitu perusahaan milik Tanoto (lihat Gambar 26 dan 27).

Gambar 25. Situs web Asian Agri dengan informasi kontak



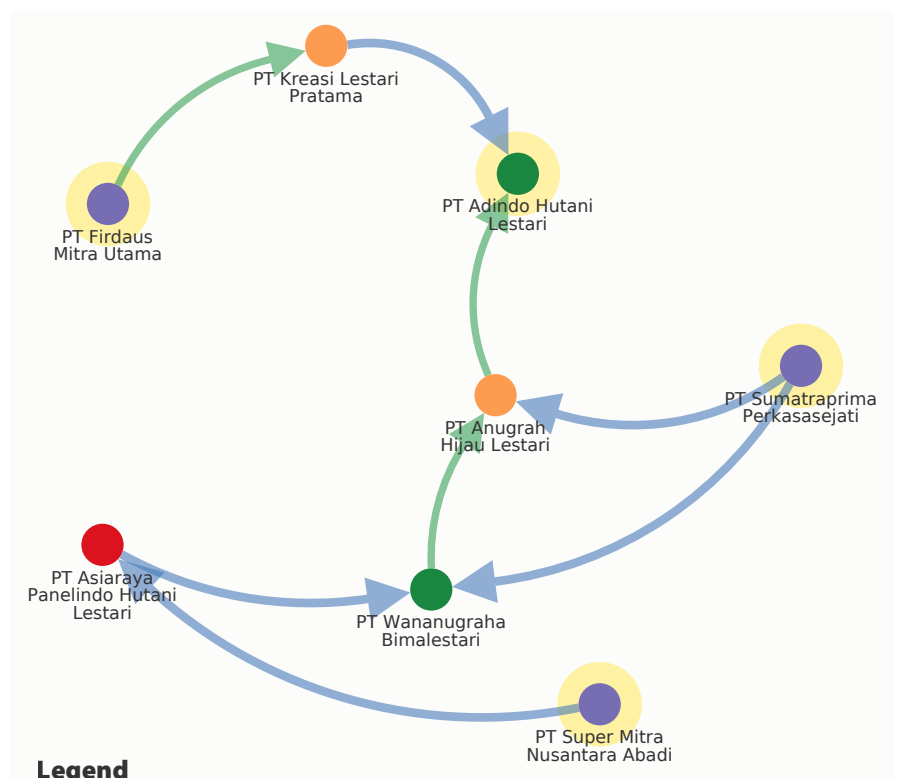
Sumber: APRIL. 2020. "Contact Us." Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020. <https://www.aprilasia.com/en/contact-us>.

Gambar 26. Gedung Uniplaza di Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang menjadi lokasi kantor PT Asian Agri dan PT Toba Pulp Lestari



Sumber: Auriga. 2020.

Gambar 27. Perusahaan perantara di struktur kepemilikan Adindo yang pernah berkantor di Gedung Uniplaza di Jl. Letjen Haryono MT No. A-1, Medan, Provinsi Sumatera Utara



Legend

- Pemegang saham mayoritas
- Pemegang saham minoritas
- Pernah berkantor di satu alamat dengan Asian Agri dan PT Toba Pulp Lestari Tbk di Medan
- Pemasok kayu APRIL
- Pernah berkantor di satu alamat dengan RGE dan APRIL di Jakarta
- Pernah berkantor di alamat terkait RGE di Jakarta

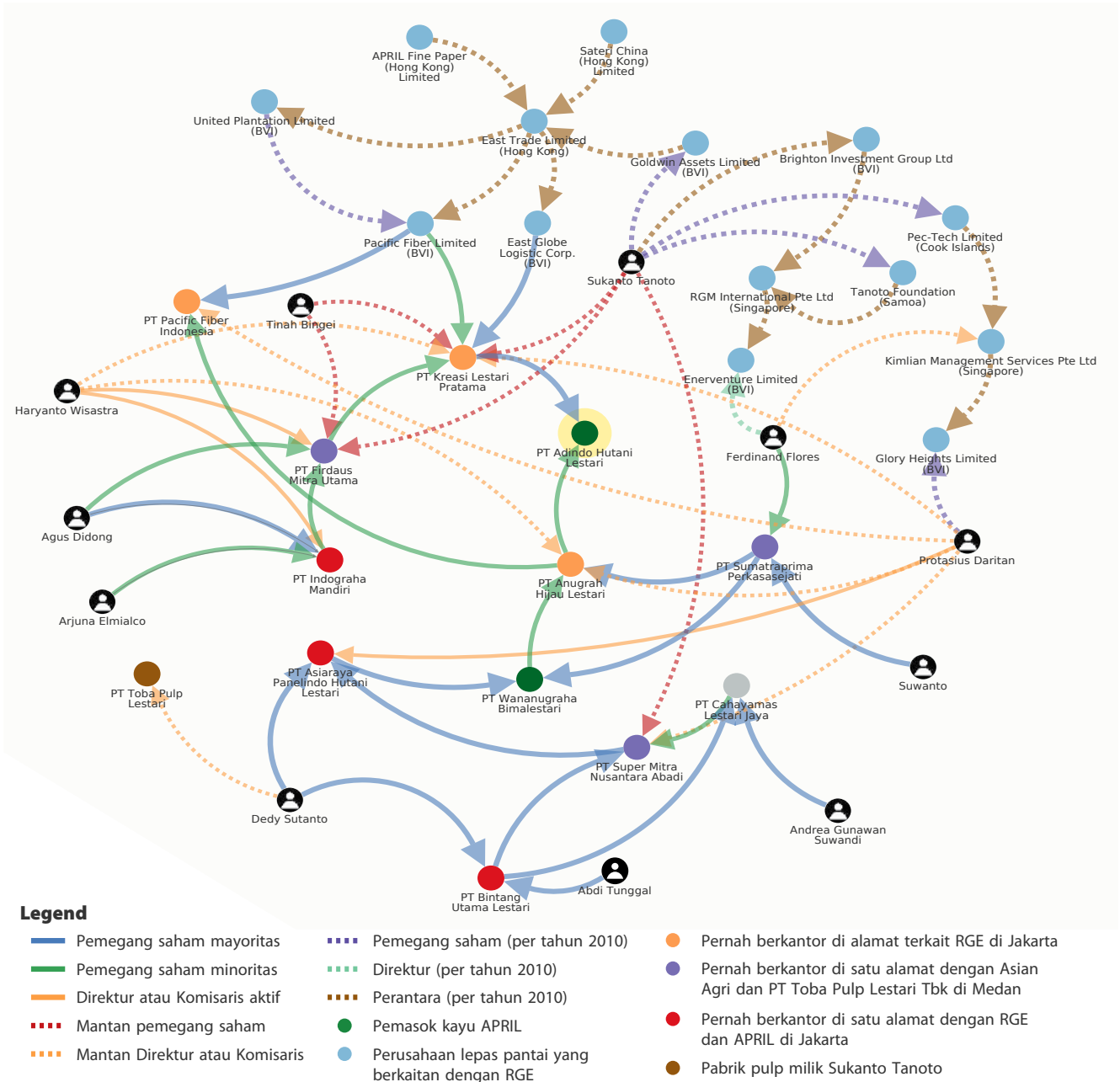
Sumber: Profil Perusahaan, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adindo sebagai Bagian dari Jaringan Korporat yang Kompleks Terkait dengan APRIL dan Grup RGE

Melalui penggabungan data kepemilikan korporat dan seluruh keterkaitan yang diutarakan di atas, maka cukup terlihat bahwa Adindo menjadi bagian dari jaringan korporat kompleks yang mengaitkan perusahaan tersebut dengan badan hukum dan individu yang berkaitan dengan Grup APRIL dan grup induknya, RGE (lihat Gambar 28).

Jaringan tersebut melibatkan sedikitnya sepuluh perusahaan yang berdomisili di Indonesia dan pernah terdaftar di alamat, masa lalu dan masa kini, yang berkaitan dengan RGE dan perusahaan afiliasinya. Sebagian besar perusahaan Indonesia ini dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan induk yang terdaftar di yurisdiksi *offshore*. Setidaknya lima individu yang berkaitan erat dengan APRIL dan RGE, termasuk Sukanto Tanoto dan isterinya, pernah atau masih berkaitan dengan perusahaan induk yang memegang kendali langsung maupun tidak langsung atas Adindo. Dilihat secara keseluruhan, maka jaringan badan hukum dan direktorat yang saling berkaitan ini menjadi indikasi kuat bahwa keterkaitan Adindo dengan APRIL dan RGE ternyata jauh lebih dekat daripada klasifikasinya sebagai “Pemasok Pasar Terbuka”.

Gambar 28. Struktur korporat Adindo



Sumber: Profil Perusahaan, Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Offshore Leaks ICJ.

VIII. Kegagalan KPMG dalam Mendeteksi Pelanggaran di Konsesi Adindo dalam “Laporan Jaminan”

Pada bulan April 2018, KPMG mengunjungi areal konsesi Adindo sebelum menerbitkan Laporan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2,0 Grup APRIL pada Juli 2018. KPMG menyatakan amanat pelaporannya adalah: “melakukan kegiatan *assurance* terbatas terhadap data dari 45 indikator kinerja yang diajukan oleh APRIL terkait SFMP 2.0-nya selama periode 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017.”

Sebagian deforestasi di Adindo yang terdokumentasi dalam laporan ini, yakni hampir 2.000 hektare, terjadi pada tahun 2017. Namun, laporan KPMG yang menerbit pada tahun 2018 tidak menyatakan bahwa deforestasi itu terjadi.⁷⁶ Sebaliknya, KPMG tampak memberi indikasi bahwa mereka tidak dapat menentukan apakah pengembangan hutan tanaman pada Pemasok Pasar Terbuka berlangsung di Kawasan hutan atau area yang ditetapkan sebagai NKT atau SKT. KPMG menyatakan, “Meskipun ada banyak kemajuan dalam memperoleh data Pemasok Pasar Terbuka untuk mendukung kegiatan monitoring kinerja di SFMP 2.0, masih terdapat beberapa celah dalam ketersediaan data mengenai: Indikator I.b # Ha yang dikembangkan per kategori” (lihat Gambar 29).

Gambar 29. Petikan dari laporan KPMG terhadap pelaksanaan kebijakan keberlanjutan APRIL (2018) tentang Pemasok Pasar Terbuka

Open Market Suppliers

While significant progress has been achieved in acquiring Open Market Supplier data to support performance monitoring under SFMP 2.0, there remain gaps in data availability with respect to:

- Indicator I.b # of Ha developed by category
- Indicator III.a # of Ha of plantation, conservation and ecosystem restoration on peatland
- Indicator VI.b # of Ha of APRIL and supplier concessions currently inactive due to unresolved conflicts
- Indicator VII.a # of fatalities
- Indicator VIII.a # of instances of fire on concessions by cause – 8 of 10 Open Market Suppliers did not provide the data.

Sumber: KPMG 2018.

Dalam laporan KPMG, Indikator I.b. dijelaskan sebagai berikut: “# Ha yang dikembangkan per kategori (berhutan, tidak berhutan dan NKT/SKT dan bukan NKT/SKT)” (lihat Gambar 30). Sepertinya pelaporan mengenai indikator ini mencakup pengembangan hutan tanaman yang melibatkan kegiatan deforestasi dan/atau terjadi di hutan NKT atau SKT. Hal ini menyangkut prinsip inti dari komitmen SFMP 2.0 APRIL untuk “nol deforestasi” dan “tidak ada pengembangan baru di lahan gambut yang berhutan”. Jadi, sangat mengherankan bahwa “laporan jaminan” yang dimaksudkan untuk membahas pelaksanaan APRIL atas “Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan”-nya tidak menilai apakah para pemasok yang mengirimkan 29% dari keseluruhan pasokan bahan bakunya mematuhi komitmen kunci tersebut.

76 Dalam laporannya tentang pelaksanaan SFMP 2.0 APRIL pada tahun 2016, KPMG mencatat bahwa “Pengembangan 39 ha lahan gambut berhutan dan pemungutan kayu rimba campuran terjadi di konsesi PT Adindo Hutani Lestari di Kalimantan setelah tanggal moratorium yang ditetapkan dalam SFMP 2.0 APRIL dan kemudian direhabilitasi.” (Lihat <https://sustainability.aprilasia.com/en/sustainable-forestry-management-policy-2-/2016-sfmp-2-0-full-assurance-report/>)

Penjelasan KPMG bahwa kurangnya ketersediaan data menghambat kemampuannya untuk menilai ada tidaknya deforestasi di areal konsesi Pemasok Pasar Terbuka tidak memuaskan dalam konteks ini, mengingat ketersediaan data citra satelit, seperti dari Landsat dan Sentinel, mencakup periode waktu pelaporan. KPMG hanya memerlukan informasi dari APRIL atau Adindo mengenai batas areal konsesi, karena data lainnya mudah diakses dari sumber yang bebas dan terbuka untuk umum, sebagaimana dilakukan dalam penulisan laporan ini. Sebenarnya, anggota Komite Penasehat Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Advisory Committee, SAC*) APRIL, yaitu pihak penerima “laporan jaminan” KPMG, bisa saja membuka platform yang tersedia untuk umum seperti Global Forest Watch dan Borneo Deforestation Atlas, sehingga dapat melihat bukti deforestasi dengan mata sendiri, sama seperti orang awam lainnya.

Gambar 30. Petikan dari laporan KPMG terhadap pelaksanaan kebijakan keberlanjutan APRIL (2018) tentang indikator kinerja terkait dengan keberlanjutan jangka panjang

Eight Long Term Sustainability performance indicators were assessed as follows:

I	Long Term Sustainability:
Overall objective: By increasing the productivity of our own plantations and those of our suppliers on our existing plantation footprint and eliminating mixed hardwood from natural forest from our supply chain.	
a.	Tonnes and % of fiber supply by region (PT. RAPP, Suppliers, (concessions, community forests))
b.	# of Ha developed by category (Forested, Non-Forested and HCV ¹ /HCS ² and non-HCV/HCS)
c.	# of PT. RAPP and supplier non-compliant new development detected and the % of non-compliances resulting in corrective action
d.	# of tonnes mixed hardwood (MHW) deliveries utilized by the Kerinci mill
e.	% Change in mill fiber consumption capacity
f.	Land or licenses acquired by APRIL after 3 June 2015 and # of hectares of associated development (HCV/HCS and non-HCV/HCS)
g.	Third party mill deliveries (# of tonnes) from post June 3, 2015 clearing of HCV, HCS forests or forested peatlands
h.	Ha of plantation in outgrower programs

¹High Conservation Value
² High Carbon Stock

Sumber: KPMG 2018

IX. Kesimpulan

Laporan ini mendokumentasikan bahwa 7.291 ha hutan alam musnah di areal konsesi HTI milik PT Adindo Hutani Lestari selama periode tanggal 3 Juni 2015 sampai 31 Agustus 2020. Separuh lebih deforestasi – sekitar 3.769 ha atau 51,6 persennya – terjadi di areal yang ditetapkan sebagai wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dalam penilaian yang dilakukan oleh Tropenbos pada tahun 2014. Hampir semua deforestasi di kawasan NKT terjadi pada lahan yang diklasifikasikan sebagai “tanaman pokok dengan water management”, tampaknya mengacu pada kawasan lahan gambut yang telah ditetapkan memiliki Nilai Konservasi Tinggi dan telah ditetapkan oleh pemegang konsesi untuk pengembangan hutan tanaman untuk kayu pulp. Memang, lebih dari 50% deforestasi (3.790 ha) terjadi di lahan gambut. Selama periode 2015–2019, perusahaan operasional APRIL, yaitu PT Riau Andalan Pulp & Paper membeli lebih dari 2,3 juta m³ bahan baku kayu pulp dari Adindo, sehingga perusahaan HTI tersebut menjadi salah satu dari lima pemasok kayu terbesar untuk APRIL.

Sebagaimana disebutkan di atas, laporan ini tidak menyatakan bahwa deforestasi dan konversi lahan gambut yang didokumentasikan di konsesi PT Adindo Hutani Lestari selama periode 3 Juni 2015 – 31 Agustus 2020 merupakan pelanggaran terhadap hukum atau peraturan pemerintah Indonesia. Namun demikian, seperti halnya pembelian kayu dari Adindo oleh APRIL selama periode yang tercakup oleh laporan ini merupakan pelanggaran besar terhadap komitmen grup untuk menghentikan “pengembangan baru di lahan gambut berhutan.” Deforestasi luas yang terdokumentasi di dalam areal konsesi Adindo juga menantang integritas komitmen “nol deforestasi” yang menjadi inti dari “Kerangka Kerja Keberlanjutan Industri Kehutanan, Serat, Pulp & Kertas,” yang berlaku bagi semua perusahaan Grup RGE dan mulai diterapkan pada bulan Juni 2015..

Temuan ini memperlihatkan APRIL gagal menepati beberapa komponen kunci dari janjinya, yaitu “APRIL dan para pemasoknya hanya akan mengembangkan wilayah yang tidak berhutan, sesuai hasil identifikasi melalui penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) yang independen dan dinilai oleh rekan sejawat”; dan komitmennya bahwa “APRIL tidak akan . . . menerima kayu dari lahan pihak ketiga, dimana penjualnya setelah tanggal 3 Juni 2015 diketahui telah membuka lahan di hutan NKT atau SKT, maupun lahan gambut yang berhutan.” Temuan ini juga mempertanyakan janji APRIL bahwa grup akan “mengimplementasikan praktek-praktek pengelolaan terbaik di lahan gambut yang mendukung target Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memelihara nilai-nilai konservasi yang lain.”

Selain itu, pernyataan APRIL yang menggambarkan Adindo sebagai “Pemasok Pasar Terbuka” sulit untuk mencocokkan dengan adanya keterkaitan berlapis-lapis dengan perusahaan dan orang individu yang terkait dengan APRIL dan grup induknya, yaitu RGE. Terkait secara signifikan dengan hal tersebut, kajian ini tidak dapat menemukan bukti bahwa PT Adindo Hutani Lestari menyerahkan laporan mengenai kepemilikan manfaatnya di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana diwajibkan oleh hukum Indonesia.⁷⁷ Struktur korporat Adindo yang kompleks – dengan jaringan perusahaan induk lepas pantai, banyak di antaranya yang berdomisili di yurisdiksi berpajak rendah – yang memiliki efek mengaburkan pihak yang paling bertanggung jawab atas perusahaan. Namun, analisis yang disajikan dalam laporan ini mengisyaratkan bahwa Adindo dikendalikan oleh individu tertentu yang merupakan pemilik manfaat dan/atau berafiliasi erat dengan APRIL dan Grup RGE.

77 Pada bulan Maret 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan baru, yaitu Peraturan Presiden No. 13/2018, yang mewajibkan semua perusahaan di Indonesia untuk mengumumkan pemilik manfaatnya dalam rentang waktu satu (1) tahun setelah peraturan diberlakukan.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menimbulkan pertanyaan yang merisaukan tentang cara APRIL dan Grup RGE dalam melaksanakan dan memonitor komitmennya dalam “nol deforestasi” dan “tidak ada pengembangan baru di lahan gambut”. APRIL berusaha meyakinkan pemangku kepentingan tentang kepatuhannya pada kebijakan keberlanjutan dengan menugaskan perusahaan pengaudit internasional KPMG untuk menyusun “laporan jaminan”. Namun tidak ada indikasi, baik dalam “laporan jaminan” terbaru KPMG yang diterbitkan pada bulan Juli 2019, maupun laporan sebelumnya, bahwa deforestasi terjadi di lahan gambut berhutan di dalam konsesi Adindo.⁷⁸ Padahal, kajian kami menemukan bahwa itu terjadi.

“Laporan jaminan” juga tidak mengindikasikan adanya deforestasi terjadi di pemasok lain, yaitu PT Fajar Surya Swadaya di Provinsi Kalimantan Timur, yang menjadi subyek dari laporan deforestasi sebelumnya oleh Koalisi Anti Mafia Hutan.⁷⁹ Kasus deforestasi ini sudah menjadi subyek dari pengaduan yang diajukan kepada Forest Stewardship Council⁸⁰ yang dianggap kredibel dan diterima oleh FSC untuk penyelidikan lebih lanjut.⁸¹ APRIL terus membeli kayu dari PT Fajar Surya Swadaya, menurut daftar pemasok kayu per 31 Agustus 2020.

Kegagalan “laporan jaminan” KPMG untuk mendeteksi deforestasi dan pengembangan di lahan gambut menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas sistem APRIL untuk memastikan kepatuhannya pada kebijakan keberlanjutannya sendiri. Adalah mengherankan, misalnya, KPMG mengaku tidak mampu memperoleh data yang memadai tentang jumlah hektare yang dikembangkan di setiap kategori (“Berhutan, Tidak Berhutan dan NKT/SKT dan bukan NKT/SKT”) untuk Adindo dan “Pemasok Pasar Terbuka” APRIL lainnya. Mengingat pentingnya indikator ini pada SFMP 2.0 APRIL, maka patut dipertanyakan mengapa KPMG tidak mencari sumber data selain dari perusahaan yang dimonitorinya, karena data itu tersedia secara luas di ranah publik. Untuk laporannya di masa mendatang, KPMG perlu merinci seluruh deforestasi dan degradasi lahan gambut secara sepenuhnya di dalam konsesi yang dioperasikan oleh pemasok kayu APRIL. Dan, sebagaimana diperlihatkan oleh laporan ini dan laporan sebelumnya, hasil kerjanya sedang diperiksa oleh pihak independen.

Bagi Forest Stewardship Council, laporan ini seharusnya menimbulkan kekhawatiran tentang apakah kurangnya transparansi dalam struktur korporat dan masalah yang menimpa Asia Pulp & Paper (APP) dapat terulang lagi pada APRIL, sehingga menghalangi upaya FSC untuk kembali menjalankan hubungan dengan grup tersebut. Sepertinya penilaian paduk (*baseline assessment*) terhadap APRIL yang sedang berlangsung oleh FSC guna menentukan kesiapannya untuk proses peta jalan penghentian disosiasi belum mencakup Adindo saat ini. Apabila FSC menggunakan kategori pemasok yang ditetapkan oleh APRIL untuk menentukan ruang lingkup pertanggungjawabannya, maka laporan ini seharusnya membunyikan kentungan tanda bahaya.

78 KPMG. 2019. *Laporan Interim tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2,0 APRIL*. Vancouver, Kanada: KPMG Performance Registrar Inc. <https://www.aprildialog.com/wp-content/uploads/2019/07/APRIL-2019-SFMP-Assurance-Report.pdf>.

79 Koalisi Anti Mafia Hutan. 2019. *Update Deforestasi Borneo: Asia Pulp & Paper dan Grup APRIL tetap memperoleh kayu pada tahun 2018 dari pemasok kontroversial yang dimiliki Grup Djarum*. Oktober 2019. <https://auriga.or.id/resources/reports/56/borneo-deforestation-update-asia-pulp-paper-and-april-groups-continued-in-2018-to-source-wood-from-controversial-supplier-owned-by-djarum-group>.

80 Jong, Hans Nicholas. 2019. *Pengaduan FSC diajukan tentang perusahaan kayu pulp yang terkait dengan orang terkaya di Indonesia*. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2019/12/fsc-pulpwood-deforestation-hartono-app-april-indonesia/>.

81 Jong, Hans Nicholas. 2020. *FSC dikritik atas lambatnya penyelidikan terhadap deforestasi oleh perusahaan yang terkait dengan orang terkaya di Indonesia*. Mongabay. 14 Agustus 2020. <https://news.mongabay.com/2020/08/fsc-deforestation-djarum-robert-hartono-pulp-auriga/>.

X. Rekomendasi

Berdasarkan temuan yang disajikan dalam laporan ini, maka Koalisi Anti Mafia Hutan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi berikut, kepada:

PT Adindo Hutani Lestari agar:

- Segera menghentikan seluruh deforestasi dan pengembangan di lahan gambut di dalam areal konsesi HTI;
- Mengumumkan rencana yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melindungi 61.334 ha hutan alam yang masih tersisa, dan merestorasi seluruh areal NKT yang terdegradasi, calon hutan SKT dan ekosistem gambut (terlepas dari kedalaman gambut maupun klasifikasi) di dalam areal konsesinya;
- Menyampaikan laporan kepemilikan manfaat kepada Pemerintah Indonesia, sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018.

Grup APRIL agar:

- Menyelidiki dan menerbitkan laporan publik mengenai deforestasi di areal konsesi Adindo selama periode diberlakukannya kebijakan SFMP 2.0 APRIL pada tanggal 3 Juni 2015, dan menjelaskan mengapa deforestasi tersebut tidak terdeteksi oleh APRIL maupun mitra keberlanjutannya sampai sekarang;
- Menerapkan dengan sepenuhnya seluruh ketentuan “nol-deforestasi” dan “tidak ada pengembangan baru di lahan gambut yang berhutan” yang terdapat dalam Kerangka Kerja Keberlanjutan Industri Kehutanan, Serat, Pulp & Kertas RGE dan SFMP 2.0 APRIL. Untuk hal tersebut diperlukan kepatuhan dengan Pendekatan Stok Karbon Tinggi, penugasan tenaga penilai bersertifikat Assessor Licensing Scheme (ALS), dan keikutsertaan dalam prosesor asuransi mutu HCV Resource Network guna menjamin pengidentifikasian areal NKT, hutan SKT dan lahan gambut secara mantap, serta pengacuan pada buku pedoman Integrated HCV-HCS Approach Assessment Manual;
- Mengumumkan struktur manajemen Adindo dan “Pemasok Pasar Terbuka” lain, dan menjelaskan kepada publik seluruh keterkaitan – baik langsung maupun tidak langsung – dengan APRIL, Grup RGE dan/atau keluarga Tanoto;
- Mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tentang kepemilikan manfaat dengan mengumumkan struktur kepemilikan, termasuk para pemilik saham kendali, untuk semua perusahaan di Grup APRIL, “Mitra Pemasok”-nya, dan “Pemasok Pasar Terbuka” manapun yang terkait.

KPMG Performance Registrar Inc. agar:

- Melakukan kajian yang akuntabel menyangkut deforestasi dan pengembangan di lahan gambut yang terjadi di areal konsesi HTI yang dioperasikan oleh PT Adindo Hutani Lestari dan PT Fajar Surya Swadaya, dan menilai pelanggaran nyata terhadap komitmen SFMP 2.0 APRIL;
- Memeriksa metodologi yang digunakan dalam penyiapan “laporan jaminan” untuk APRIL dan memastikan bahwa setiap laporan di masa mendatang memuat penilaian yang kredibel, yang menggunakan data independen, untuk menentukan apakah terjadi kegiatan deforestasi dan pengembangan baru di lahan gambut di areal konsesi para pemasok APRIL;
- Memeriksa keterkaitan antara kepemilikan dan manajemen APRIL dengan PT Adindo Hutani Lestari dan potensi keterkaitan dengan “Pemasok Pasar Terbuka” lain, dan menilai apakah keterkaitan tersebut disampaikan secara akurat dan transparan kepada para pemangku kepentingan APRIL.

Forest Stewardship Council agar:

- Menghentikan proses peta jalan rencana reasosiasi APRIL dengan FSC, setidaknya sampai investigasi independen menyangkut deforestasi yang terdokumentasi di PT Adindo Hutani Lestari dan PT Fajar Surya Swadaya sudah diselesaikan;
- Mewajibkan Grup APRIL supaya memberlakukan transparansi struktur korporat untuk APRIL, perusahaan operasionalnya, para pemasok serat kayunya, serta para pemegang saham dan afliasinya sebagaimana telah diwajibkan oleh FSC kepada Asia Pulp & Paper (APP);
- Melakukan uji tuntas terhadap risiko yang dapat diakibatkan oleh struktur korporat kompleks APRIL pada misi inti dan standar pengelolaan hutan berkelanjutan FSC.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Indonesia agar:

- Meninjau laporan produksi kayu dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diajukan oleh PT Adindo Hutani Lestari untuk menentukan apakah kayu yang dipanen dari hutan alam telah dilaporkan dengan benar dan apakah royalti hutan yang disyaratkan telah dibayar penuh.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia agar:

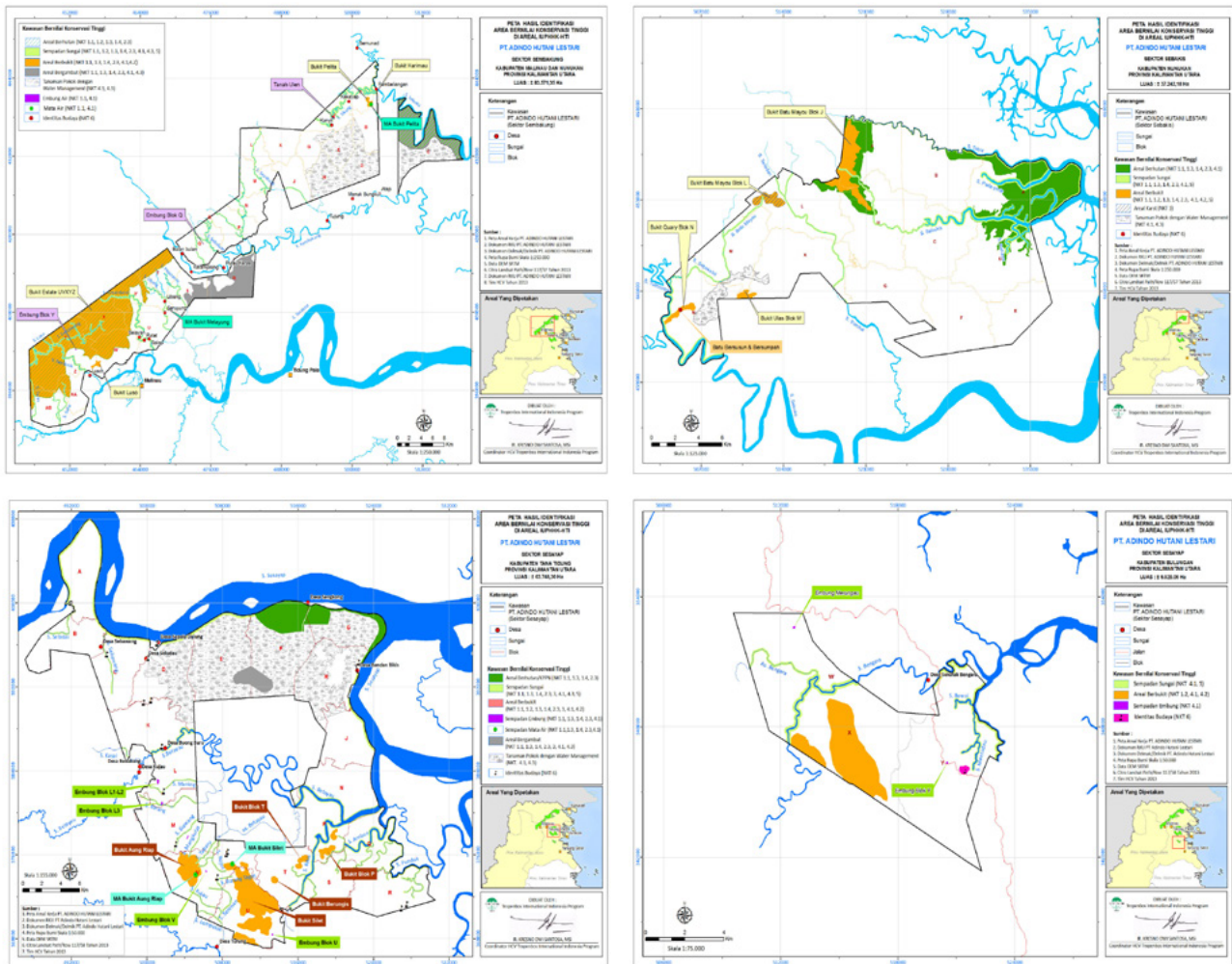
- Mewajibkan PT Adindo Hutani Lestari dan para pemegang saham korporatnya untuk mematuhi Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018, yang mengamankan semua perusahaan yang terdaftar di Indonesia untuk mengumumkan kepemilikan manfaatnya sebelum bulan Maret 2019.

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia agar:

- Meninjau apakah pembelian kayu oleh PT Riau Andalan Pulp & Paper dari PT Adindo Hutani Lestari atau "Pemasok Pasar Terbuka" dan "Mitra Pemasok" APRIL lainnya dilaporkan dengan benar sebagai transaksi pihak yang berkaitan atau transaksi pihak ketiga.


Koalisi yang menerbitkan laporan ini tidak mengklaim atau bermaksud untuk menyarankan atau menyiratkan bahwa individu, perusahaan, atau entitas lain yang termasuk dalam laporan ini telah melanggar hukum di Republik Indonesia atau yurisdiksi lain.

Lampiran A. Peta yang Terdapat di Ringkasan Eksekutif Penilaian Nilai Konservasi Tinggi untuk PT Adindo Hutani Lestari yang Disusun pada Tahun 2014 oleh Tropenbos International, dan Diumumkan di Situs Web APRIL




Sumber: Tropenbos International. 2014. Ringkasan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi tahun 2014 untuk PT Adindo Hutani Lestari. Bogor, Indonesia. <https://sustainability.aprilasia.com/en/long-term-sustainability/hcv-assessments/>.

Lampiran B. “Daftar Sumber Pasokan Serat Kayu APRIL per Tanggal 31 Agustus 2020” yang Diumumkan di Situs Web APRIL



ENGLISH | INDONESIA
Raise a Grievance

Menu


LIST OF APRIL'S FIBER SUPPLY SOURCES

as of 31 August 2020

PT RAPP-own concessions

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) is the operating arm of APRIL Group, which is based in Pangkalan Kerinci, Riau Province, Indonesia

1. PT.Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP)- Mandau
2. PT.Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP)- Pelalawan
3. PT.Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP)- Langgam
4. PT.Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP)- Teso
5. PT.Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP)- Logas
6. PT.Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP)- Ukui
7. PT.Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP)- Baserah
8. PT.Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP)- Cerenti
9. PT.Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP)- Teluk Meranti East
10. PT.Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP)- Teluk Meranti West
11. PT.Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP)- Tasik Belat
12. PT.Riau Andalan Pulp And Paper (PT.RAPP)- Pulau Padang

Open Market Suppliers

Open Market Suppliers are fiber suppliers that do not contribute to this commitment and are contracted for open-market supply purchases.

1. KTS Logs Marketing SDN. BHD (Sarawak)
2. PT. Adindo Hutani Lestari
3. PT. Fajar Surya Swadaya
4. PT. Itci Hutani Manunggal
5. PT. Korintiga Hutani
6. PT. Mayangkara Tanaman Industri (Sumitomo)
7. PT. Wahana Lestari Makmur Sukses
8. PT. Wana Subur Lestari
9. PT. Wanakasita Nusantara

Community Fiber Plantation/Hutan Rakyat(HR)

Through its Community Fiber Plantation program, APRIL fosters collaboration with communities near and around its operations, while assisting the local communities to achieve economic betterment.

1. HR Badagu
2. HR Delima Sakti
3. HR Kelompok Gunung Melintang
4. HR Kelompok Tani Lubuk Kebun
5. HR Kelompok Tani Parit Guntung
6. HR Kelompok Tani Rambahan
7. HR Kelompok Tani Situgal
8. HR Kelompok Tani Sotol
9. HR Kelompok Tani Teratak Baru
10. HR Koperasi Bahtera Mandiri
11. HR Koperasi Penarikan Jaya
12. HR Koperasi Tunas Harapan
13. HR Payakumbuh
14. HR Petapusan
15. HR Sering

Supply Partner

Supply Partners are fiber suppliers who are long term partners of APRIL and contribute to its 1-for-1 commitment, where the company aspires to conserve or restore one hectare of forest for every hectare of plantation.

1. CV. Alam Lestari
2. CV. Bhakti Praja Mulia
3. CV. Mutiara Lestari
4. CV. Putri Lindung Bulan
5. CV. Tuah Negeri
6. PT. Bina Daya Bintang*
7. PT. Bukit Betabuh Sei Indah
8. PT. Bukit Raya Mudisa
9. PT. Citra Sumber Sejahtera
10. PT. Ekawana Lestari Dharma
11. PT. Essa Indah Timber
12. PT. Harapan Jaya Makmur Lestari
13. PT. Madukoro
14. PT. Mitra Kembang Selaras
15. PT. Mitra Taninusa Sejati
16. PT. Nusa Prima Manunggal
17. PT. Nusa Wana Raya
18. PT. Nusantara Sentosa Raya
19. PT. Peranap Timber
20. PT. Rimba Lazuardi
21. PT. Rimba Mutiara Permai
22. PT. Rimba Peranap Indah
23. PT. Selaras Abadi Utama
24. PT. Seraya Sumber Lestari
25. PT. Sinar Belantara Indah
26. PT. Sumatera Riang Lestari (SRL)- Block I- Sei Kabaro
27. PT. Sumatera Riang Lestari (SRL)- Block li- Garingging
28. PT. Sumatera Riang Lestari (SRL)- Block Iv- Pulau Rupert
29. PT. Sumatera Riang Lestari (SRL)- Block V- Pulau Rangsang
30. PT. Sumatera Riang Lestari (SRL)- Block Vi- Bayas
31. PT. Sumatera Sylva Lestari
32. PT. Wananugraha Bima Lestari

***Note:** Some woods are supplied from PT. Bina Daya Bentala's concession (ex-overlapped area)

Sumber: 2020. “Daftar Sumber Pasokan Serat Kayu APRIL per 31 Agustus 2020.” Dashboard keberlanjutan APRIL. Diakses pada tanggal 3 September 2020. <http://sustainability.aprilasia.com/en/april-fiber-supply-source/>.

Lampiran C. Keterkaitan East Trade Limited sebagaimana Terungkap di Basis Data Offshore Leaks ICIJ

ICIJ OFFSHORE LEAKS DATABASE	
INTERMEDIARY	
East Trade Limited	
Connected to 52 entities	
Connected to 1 address	
📍 Linked countries: Hong Kong	
CONNECTIONS	
Entity	
Entity	Status
APRIL China Holdings Limited	Not To Be Renewed / In Deregistration
APRIL Fine Paper (Hong Kong) Limited	Active
EAST ASIA OIL & GAS LIMITED	Transferred Out
East Trade Limited	-
Fiber Supply (Hong Kong) Limited	Active
Fiber Supply Fuzhou (HK) Limited	Active
Fiber Supply Longyan (HK) Limited	Active
Fiber Supply Putian (HK) Limited	Active
Fiber Supply Quanzhou (HK) Limited	Active
Fiber Supply Zhangzhou (HK) Limited	Active
HONEST LINE GROUP LIMITED	Active
Linea Overseas Limited	Active
RIZHAO ASIA PACIFIC LTD.	Struck / Defunct / Deregistered
SATERI INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	Transferred Out
STRONG ELEGANT INVESTMENT LIMITED	Active
SUPER FIELD HOLDINGS LIMITED	Transferred Out
Sateri China (Hong Kong) Limited	Not To Be Renewed / In Deregistration
Sateri Fuzhou (Hong Kong) Limited	Active
UNION ADVANCE LIMITED	Active
UPCORP LIMITED	Active
Heungbo Trading Limited	Active
INTELLECTUAL FOSTER LIMITED	Active
KIRRAWEE INVESTMENTS LIMITED	Active
Linea Overseas Limited	Active
PACIFIC ENERGY ENTERPRISES LTD	Active
PACIFIC FIBER LIMITED	Active
RIZHAO ASIA PACIFIC LTD.	Struck / Defunct / Deregistered
SATERI INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED	Transferred Out
SILVER OVERSEAS GROUP LIMITED	Active
STRONG ELEGANT INVESTMENT LIMITED	Active
SUPER FIELD HOLDINGS LIMITED	Transferred Out
SUPREME LINK INTERNATIONAL LIMITED	Active
Sateri China (Hong Kong) Limited	Not To Be Renewed / In Deregistration
Sateri Fuzhou (Hong Kong) Limited	Active
TRESTON INTERNATIONAL LIMITED	Active
UNION ADVANCE LIMITED	Active
UPCORP LIMITED	Active
United Plantation Limited	Active
United Plywood Limited	Active
United Trade & Services Limited	Active

Sumber: International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). 2020. East Trade Limited. Basis Data Offshore Leaks. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020. <https://offshoreleaks.icij.org/>.

Lampiran D. Surat PT Adindo Hutani Lestari kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper Mengenai Temuan di Laporan ini



PT ADINDO HUTANI LESTARI

Pusat: Menara Batavia Lt 11, Jl. KH Mas Mansyur Kav 126
Jakarta Pusat 10250
Operasional: Jl. Raja Pandita No. 88 B. RT V.Malinau Hulu,
Kec. Malinau Kota, Kab.Malinau-Kalimantan Utara,77554
Tlp. 0553-2022463 Fax. 0553-2022464

Jakarta, 30 September 2020

Nomor : 118/AHL-Dir/IX/2020
Lampiran :
Perihal : **Surat Tanggapan**

Kepada Yth,
Direksi PT Riau Andalan Pulp And Paper
Di –
Pangkalan Kerinci.

Dengan hormat,

Menanggapi Surat PT Riau Andalan Pulp And Paper Nomor 103/EXT/LGL-RAPP/IX/2020 tanggal 29 September 2020, dengan ini kami sampaikan tanggapan atau penjelasan sebagai berikut:

Pertanyaan No. 1:

Kepemilikan sebelumnya oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei di dalam struktur kepemilikan Adindo.

Tanggapan No. 1:

Bahwa struktur kepemilikan saham PT Adindo Hutani Lestari ("**Adindo**") tidak pernah dimiliki oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei.

Pertanyaan No. 2:

Komisaris, direktur, dan pemegang saham di dalam struktur kepemilikan Adindo saat ini dilaporkan memiliki hubungan dengan RGE, APRIL dan/atau perusahaan terkait RGE: Protasius Daritan, Hartanto Wisastra, Dedy Sutanto dan Ferdinand Flores.

Tanggapan No. 2:

Bahwa Protasius Daritan, Hartanto Wisastra, Dedy Sutanto dan Ferdinand Flores saat ini tidak pernah menjadi komisaris, direktur dan pemegang saham dalam Adindo .

Pertanyaan No. 3

Struktur kepemilikan Adindo mencakup perusahaan dengan alamat yang sama dengan kantor pusat RGE dan APRIL di Jakarta serta PT Asian Agri dan PT Toba Pulp Lestari Tbk. di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, sebuah kantor yang beralamat di Jalan Teluk Betung No. 36 di Jakarta tampaknya terkait dengan RGE dan/atau perusahaan afiliasinya.

Lampiran D (berlanjut)



PT ADINDO HUTANI LESTARI

Pusat: Menara Batavia Lt 11, Jl. KH Mas Mansyur Kav 126
Jakarta Pusat 10250

Operasional: Jl. Raja Pandita No. 88 B. RT V. Malinau Hulu,
Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau-Kalimantan Utara, 77554
Tlp. 0553-2022463 Fax. 0553-2022464

Tanggapan No. 3:

Bahwa alamat resmi kantor Adindo adalah di Menara Batavia, Jalan KH Mas Mansyur Kav 126, Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Oleh karena itu, Adindo tidak pernah berkantor di Jalan Teluk Betung No. 36 Jakarta Pusat.

Pertanyaan No. 4

Pemegang saham tidak langsung Adindo termasuk perusahaan yang didirikan di British Virgin Island (BVI) sebuah kawasan yurisdiksi yang terkenal dengan tarif pajak perusahaan rendah dan persyaratan transparansi yang terbatas untuk kepemilikan dan struktur manajemen perusahaan.

Tanggapan No 4:

Bahwa kepemilikan saham Adindo oleh perusahaan yang berdomisili di British Virgin Island adalah legal dan sah menurut hukum di Indonesia dan dilakukan semata-mata untuk strategi bisnis dan efisiensi perusahaan nasional maupun internasional.

Pertanyaan No. 5

Data dari *Offshore Leaks and Paradise Paper* yang diterbitkan oleh Konsorsium Jurnalistik Investigasi Internasional (ICIJ) menunjukkan bahwa pemegang saham perusahaan tidak langsung Adindo pernah terkait dengan perusahaan yang diketahui berafiliasi dengan Group RGE dan/atau perusahaan afiliasinya, serta ketua pendiri dan yang diduga sebagai pemilik manfaat Sukanto Tanoto.

Tanggapan No. 5:

Bahwa pemegang saham Adindo sekarang ini adalah PT Kreasi Lestari Pratama sebanyak 60%, dan PT Anugrah Hijau Lestari sebanyak 40%, dan kedua pemegang saham tersebut tidak berafiliasi dengan Group RGE.

Demikian surat tanggapan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Adindo Hutani Lestari

Amien Mohammad
Direktur

Lampiran E. Tanggapan Grup APRIL terhadap Temuan Utama di Laporan ini



02 October 2020

Mr. Syahrul Fitra
Auriga Nusantara
Bukit Cimanggu City, Greenland Residence
Blok HH.17, No. 16, Bogor, Java Barat

RE: Clarifications on PT Adindo Hutani Lestari

Dear Syahrul,

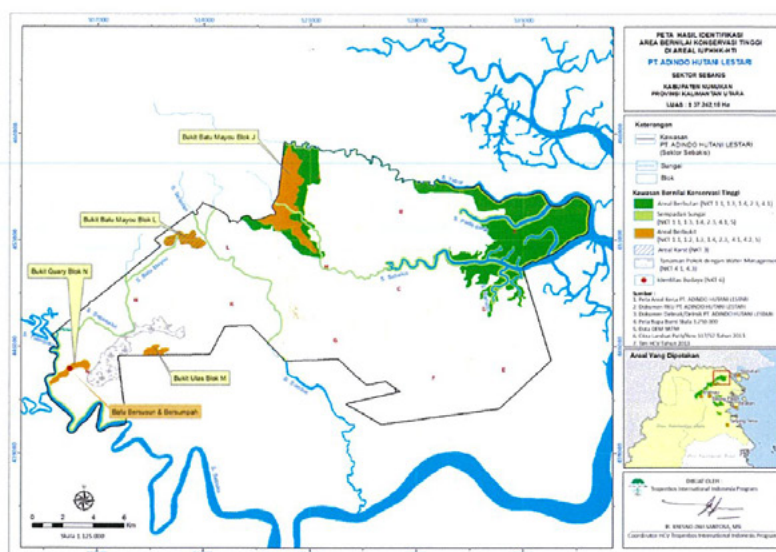
Thank you for the opportunity to offer clarifications regarding allegations of deforestation or loss of natural forest in PT. Adindo Hutani Lestari (PT. AHL) concessions between June 2015 and June 2020, the ownership structure of PT. AHL, and the KPMG assurance audit process as it relates to PT. AHL.

Based on our internal investigation, we have concluded that there have been no breach of our SFMP 2.0 commitments or any destruction of HCV areas in the plantations established between June 2015 and June 2020 in PT AHL, and we offer comprehensive evidence below to support this.

Deforestation and SFMP Violation Claims

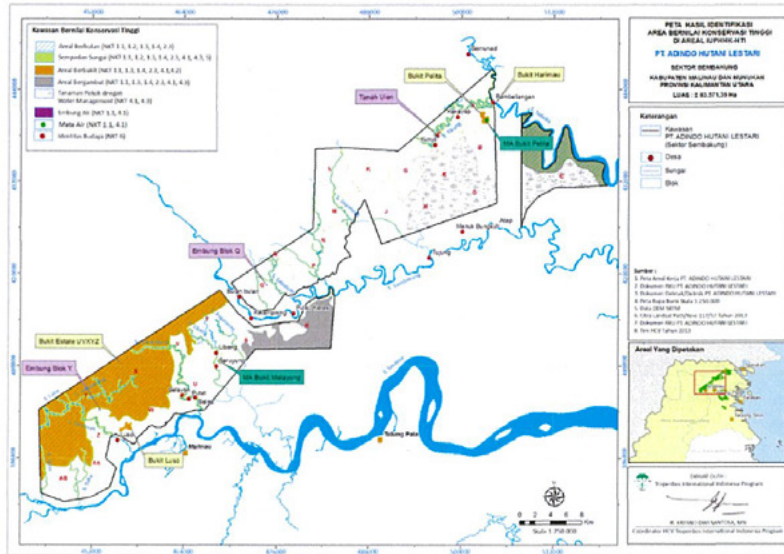
APRIL's Sustainable Forest Management Policy (SFMP) 2.0 specifically commits to "only develop areas that are not forested, as identified through independent peer-reviewed HCV and HCSA assessments", and this commitment extends to all of APRIL's fiber supply chain.

As you note in your letter, PT. AHL completed the requirements of a HCV assessment in February 2014 and an Executive Summary, including maps as shown below (Maps 1 – 4), is available on our Sustainability Dashboard ([AHL HCV](#)).

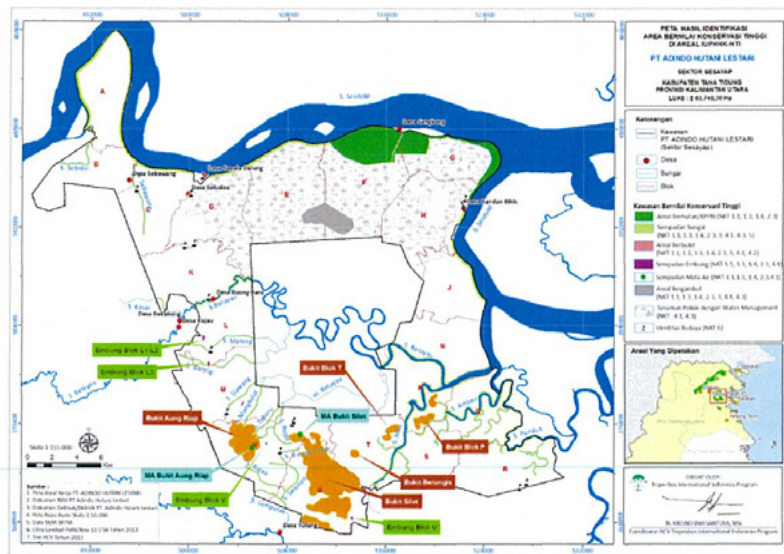


Map 1. AHL Sebakis HCV mapping (2014)

Lampiran E (berlanjut)

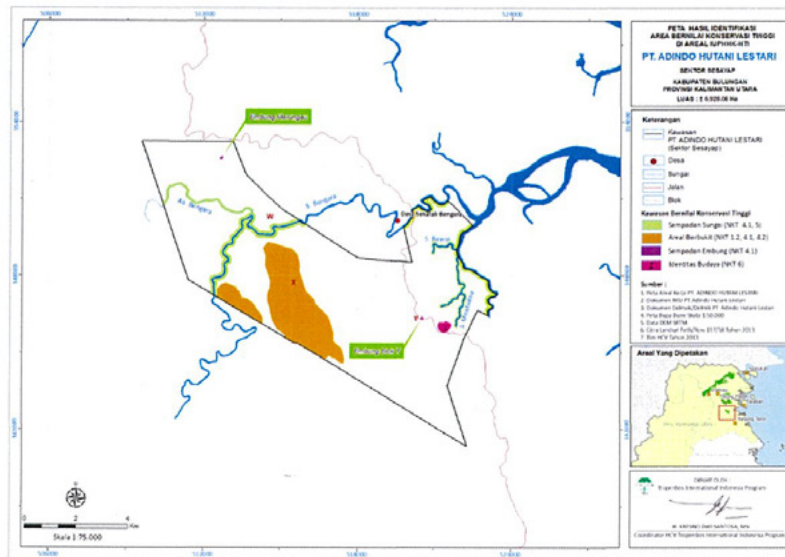


Map 2. AHL Sembakung HCV mapping (2014)



Map 3. AHL Sesayap HCV Mapping (2014)

Lampiran E (berlanjut)



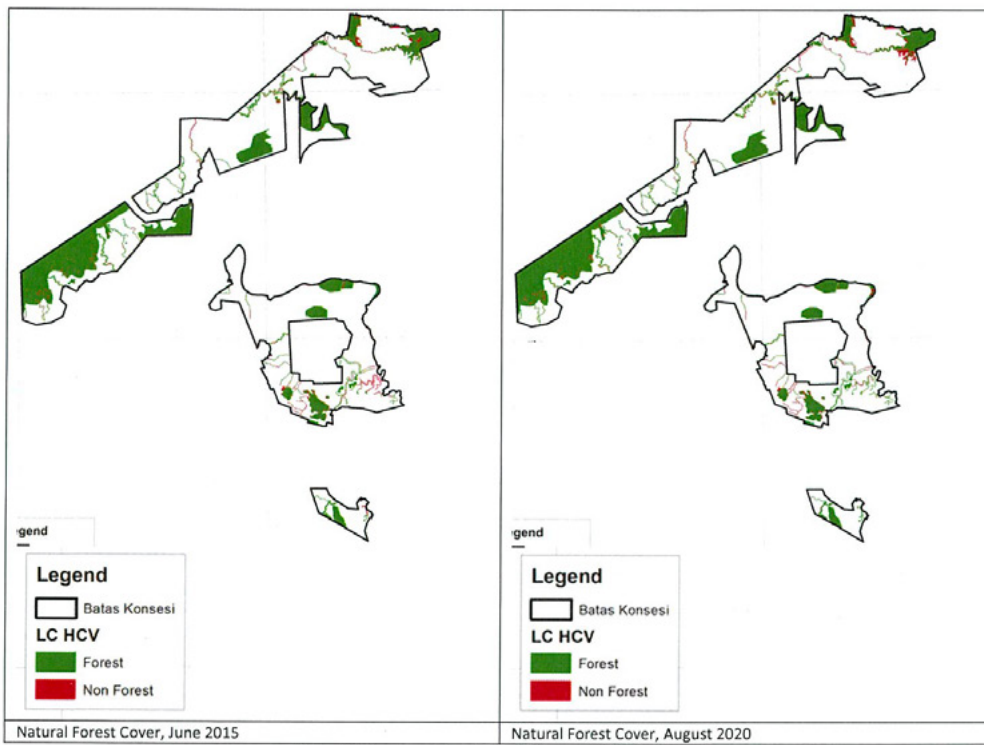
Map 4. AHL Sesayap Bengara HCV Mapping (2014)

It is important to note that based on these HCV results, PT AHL now conserves 89,181 hectares or 47% of its total concession area. This is almost double the area developed into plantations which total 50,388 hectares or 26% of the concession area. This translates to a very high conservation to plantation ratio of 1.8:1.

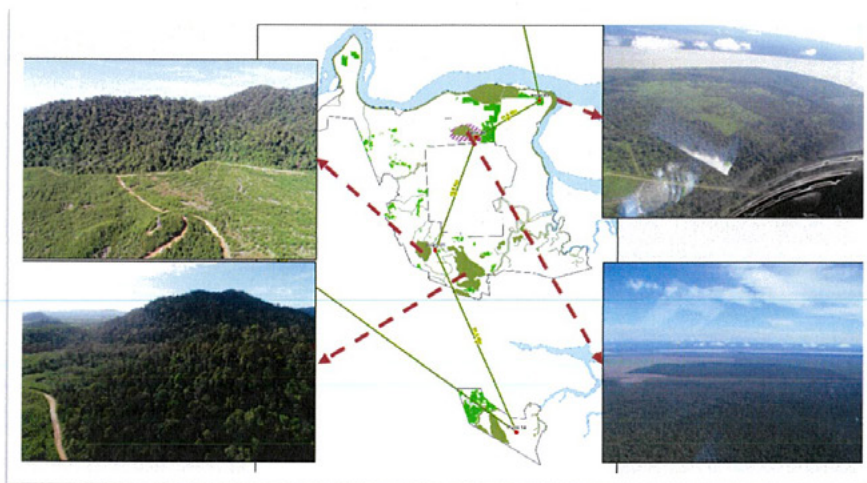
We take any claims of deforestation seriously, and after investigation, including ground-truthing, we can confirm that no deforestation or breach of our SFMP 2.0 policy commitment has occurred. The facts are:

- Between 3 June 2015 and 31 August 2020, 8,387 hectares of plantations were established in PT. AHL. **None of these are located in identified HCV areas.** This is proven by an analysis of the original HCV maps and a comparison of the maps showing the HCV and conservation areas in 2015 and in 2020 based on remote sensing analysis (see Map 5 Comparative Forest Cover 2015 – 2020).
- Land preparation activities for all of the 8,387 hectares of plantations were completed before 15 May 2015, as independently verified by PT. Hatfield Indonesia, an environmental consultant with expertise in remote sensing. **Hatfield’s analysis confirmed these areas were non-HCV areas and harvested prior to the 15 May cut-off date per APRIL’s SFMP 2.0.** Please refer to Pictures 1 – 4 below for reference.
- Of the 8,387 hectares 6,058 hectares is classified as peat and **none of these are on a protected Peat Dome Peak Area** (MOEF FEG Map SK.130/2017).
- As with all of our fiber suppliers, PT. AHL is subject to an annual internal due diligence process and independent assurance by KPMG as part of our SFMP commitments. The KPMG audit reports are publicly available ([KPMG](#)). PT AHL is also subject to APRIL’s Land Cover Change monitoring system which analyzes monthly Land Sat data for any changes in forest cover
- As noted in your letter, the plantation establishment activities during the period from 3 June 2015 to 31 August 2020 are in compliance with Indonesian laws and regulations and in line with APRIL’s SFMP 2.0 commitments and HCV guidance.

Lampiran E (berlanjut)

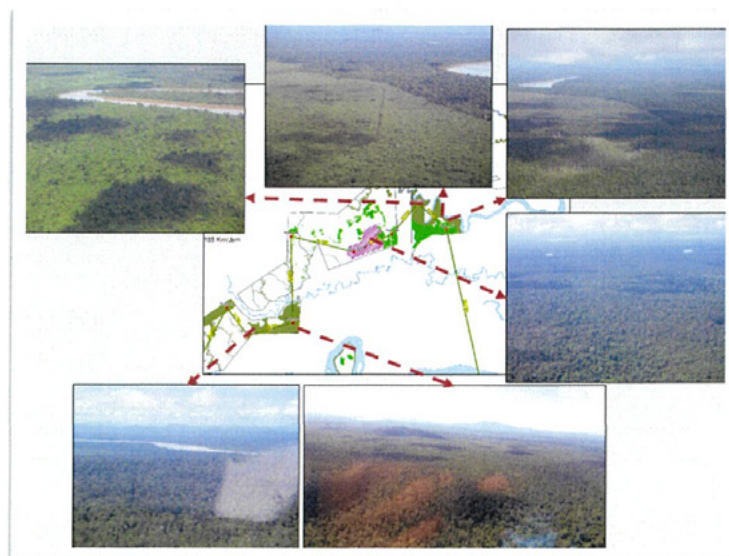


Map 5. Comparative Forest Cover 2015 to 2020

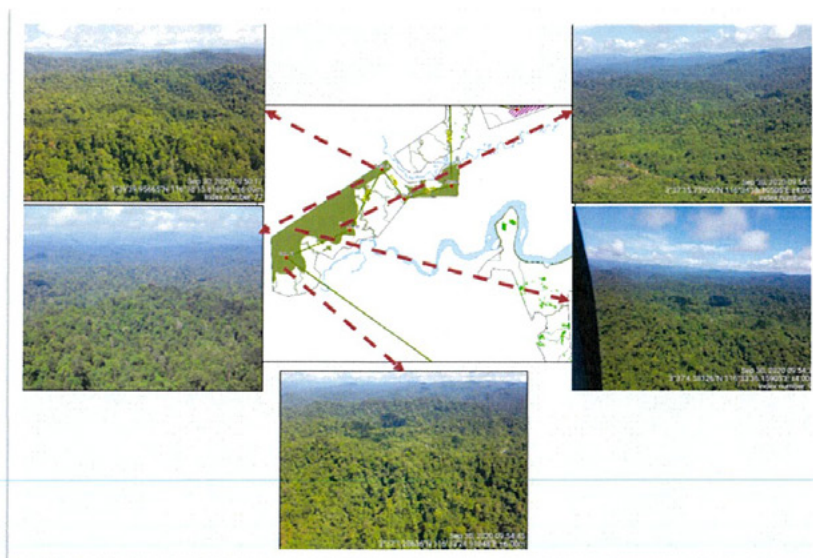


Picture 1 - Aerial Survey AHL 30 September 2020

Lampiran E (berlanjut)



Picture 2 - Aerial Survey AHL 30 September 2020



Picture 3 - Aerial Survey AHL 30 September 2020

Ownership and Organisation Structure

PT. AHL is a key supplier to APRIL ([Supplier Maps](#)), including in the period from 2015 to 2019. We have referred your questions to PT AHL with regards to ownership structure and we attach PT AHL's direct reply.

KPMG Assurance

We understand that KPMG has also been contacted in relation to this issue and as an independent assurance provider, KPMG will respond independently.

Lampiran E (berlanjut)

In the meantime, we offer our clarifications below:

- KPMG undertakes an annual audit under the guidance of the Stakeholder Advisory Committee of APRIL's implementation of its SFMP commitments. The audit is completed against agreed indicators developed with a range of stakeholders.
- KPMG visited PT. AHL as part of its assurance process between April 9 and 12 2018, preceded by a comprehensive desktop review.
- KPMG's report notes that "For Open Market Suppliers, no new development has been identified to date but not all information has yet been received from the suppliers." This resulted in an Opportunity for Improvement (OFI#1).
- OFI#1 relates to APRIL's Land Cover Change (LCC) monitoring procedure which is used to identify new development. KPMG noted that there were still 511 hectares of LCC from Open Market suppliers that had not been verified and that the majority (82%) related to one supplier (not PT. AHL).
- OFI#1 has since been closed with improvements to the procedure and better reporting from our suppliers.
- This assurance report is publicly available ([2017 Report](#)) with all the annual reports also available ([All Reports](#)).

Given limited evidence provided to APRIL by Auriga, we have compiled our responses based on our internal records and published sources. Should you be able to share any of your supporting documentation for the claims you noted, we would request an opportunity to review these and provide further clarifications. We also invite you to visit PT AHL's operations and ground-truth the data we have provided. Finally, we welcome Auriga's assurance per your letter that our full response will be included in your final report.

Kind Regards



Craig Tribolet
Head of Sustainability - Operations



Lucita Jasmin
Director of Sustainability & External Affairs
APRIL Group

Lampiran F. Tanggapan KPMG Performance Registrar Inc. terhadap Temuan Utama di Laporan ini

From: "Ridley-Thomas, Christopher I" <critleythomas@kpmg.ca>
To: info@auriga.or.id
Cc: "Supin - A28" <supin@auriga.or.id>, "Syahrul" <syahrul@auriga.or.id>
Sent: Friday, October 2, 2020 7:47:25 AM
Subject: RE: Request for clarifying on APRIL Group's links to PT Adindo Hutani Lestari

Dear Supintri,

thank you for your letter. Our reports are issued to the independent Stakeholder Advisory Committee (SAC) of APRIL and we have therefore forwarded your letter to the SAC's attention.

We would be happy to forward any additional information you can provide as we note that no specific evidence of new development was attached with your letter.

Regards

Chris Ridley-Thomas

Partner, Sustainability

KPMG LLP

